

**STUDI KEBIJAKAN PEMERINTAH
TENTANG UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN
DAN RELEVANSINYA TERHADAP KOMPETENSI GURU PAI
(Telaah Undang-Undang Replublik Indonesia No 14 Tahun 2005
tentang Guru Dan Dosen)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memenuhi Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Tarbiyah



Oleh :

MAFTUHIN
NIM : 3103233

**FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

ABSTRAK

Maftuhin (3103233) : Studi Kebijakan Pemerintah Tentang Undang-undang Guru dan Dosen dan Relevansinya Terhadap Kompetensi Guru PAI (Telaah Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen). Skirpsi, Fakultas Tarbiyah, Jurusan Pendidikan Agama Islam, IAIN Walisongo Semarang, 2008.

Dalam penelitian ini rumusan permasalahan yang diangkat adalah 1) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2) Bagaimana relevansi kebijakan pemerintah dalam UU No. 14 Tahun 2005 terhadap peningkatan kompetensi guru PAI.

Dari rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2) Untuk mengetahui relevansi kebijakan pemerintah dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru terhadap peningkatan kompetensi guru PAI.

Penelitian ini merupakan naskah atau penelitian kepustakaan (*library research*). Data penelitian yang terkumpul lalu dianalisis dengan menggunakan content analisis, analisis deduktif dan reflektif thingking .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ; 1) Point penting yang dapat diambil dari dalam Kebijakan Pemerintah tentang Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan adalah diperlukan sumber manusia guru yang handal yang mempunyai beberapa kompetensi diantaranya kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi, sehingga tercipta pendidikan yang arahnya menuju terciptanya tujuan pendidikan yang diharapkan. 2) Relevansi kompetensi guru PAI dengan dalam Kebijakan Pemerintah tentang Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen bahwa guru PAI dalam wujud profesinalitasnya harus dapat mempunyai beberapa kemampuan dalam menunjang proses pembelajarannya, sehingga nantinya seorang guru dapat mendapatkan kewajibannya sebagai pendidik dengan fasilitas yang berhak di dapatkan guru. Kemampuan yang harus dimiliki guru sebagai tugas suci dalam amelanjutkan proses generasi Islam kearah tujuan pendidikan seabagai khalifah dan abdi Allah SWT juga merupakan tuntutan dalam ajaran islam yang menjunjung tinggi keahlian dan kemmpuan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya agar tidak keluar dari jalur, karena pada dasarnya tidak ada di dunia ini menjadi baik tanpa adanya pengelolaan pembelajaran yang baik dari pengajar

Berdasarkan hasil penelitian ini daharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, para tenaga pengajar, para peneliti dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tanggal

Tanda Tangan

Abdul Wahib, Drs. M.Ag.
Pembimbing I

Syamsul Ma'arif, M.Ag.
Pembimbing II

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juli 2008

Deklarator

MAFTUHIN
NIM : 3103233

PENGESAHAN

	Tanggal	Tanda Tangan
<u>Fahrur Rozi, M.Ag</u> <i>Ketua</i>	_____	_____
<u>Lianah, M.Pd.</u> <i>Sekretaris</i>	_____	_____
<u>Achmad Suja'i, M.Ag.</u> <i>Anggota</i>	_____	_____
<u>Drs. Mahfud Junaidi, M.Ag.</u> <i>Anggota</i>	_____	_____

MOTTO

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ

“Mereka bakal ditimpa kehinaan dimana saja ditemukan kecuali kalau mereka berpegang pada tali Allah dan tali manusia” (Q.S. Al-Imron : 112)¹

¹ Depag. R. I, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : Toha Putra, 1989), hlm. 94.

PERSEMBAHAN

1. Ayahanda Masrokhan dan Ibunda tercinta Musyarofah, cucuran air mata dan keringat mu takkan pernah ananda lupakan sampai akhir hayat.
2. Adik-adikku Ulil Albab, M. Khubab Ibrohim dan Rotisul Mustajabah yang selalu memberi motivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Teman-temanku Lisanudin, M. Faqih, Badrun, Hamidah, Ulfa, Tiyas yang selalu memberi motivasi, do'a dan semangat yang dapat mengantar langkahku menjadi pasti.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kahadirat allah SWT tuhan semesta alam, atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga beban berat menyelesaikan tugas akhir ini dapat terlewati. Sholawat salam semoga selalu tersampaikan kepada nabi akhir zaman Muhammad saw, sebagai penuntun jalan terang.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis tidak menutup mata akan peran serta orang lain, karena itu dalam lantaran tilisan ini pula penulis haturkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ibnu Hadjar, M. Ed selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. Abdul Wahib, M. Ag, selaku pembimbing I dan Syamsul ma'arif, M. Ag selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya sehingga mengilhami penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ayahanda dan Ibunda tercinta, atas dukungan moral bagi terselesainya skripsi ini.

Kepada mereka semua hanyalah rangkaian doa semoga amal dan karya mereka diterima allah swt dan dicatat sebagai amal saleh.

Kesadaran akan kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, maka penulis selalu mengharap tegur sapa, kritik saran demi kebaikan penulis dimasa mendatang .

Akhirnya, manfaatkanlah yang menjadi harap bagi karya ini. Amin.

Semarang, Juli 2008
Penulis

MAFTUHHIN
3103233

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
DEKLARASI.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
BAB II KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	
A. Guru dalam Pendidikan Islam	13
B. Komponen Yang Harus Dimiliki Guru PAI.....	29
BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN	
A. Kebijakan Pendidikan	43
B. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen	36

C. Bab IV dan Bab V Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Tentang Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi Guru dan Dosen.....	51
1. Persyaratan Guru dalam Bab IV Bagian Pertama Tentang Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi	51
2. Persyaratan Dosen dalam Bab V Bagian Pertama Tentang Kualifikasi, Kompetensi dan Jabatan Akademik	53

BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DAN RELEVANSINYA TERHADAP KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

A. Analisis Pentingnya Kompetensi bagi Pengembangan Profesionalitas Guru PAI	57
B. Relevansi Kompetensi Guru PAI Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
C. Penutup	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Krisis yang Selama ini menjadi permasalahan yang menjadi bahan perbincangan masyarakat umum, masyarakat akademik, masyarakat pejabat marak membicarakan berbagai krisis multidimensi mulai krisis moneter yang menggerogoti masalah ekonomi, krisis moral yang menggerogoti masalah bejatnya mentalitas penguasa dan masyarakat kita, krisis intelektual yang menggambarkan betapa merosotnya strata pendidikan kita, dan lain-lain yang tentunya masih banyak model krisis yang melanda bangsa kita. Menyedihkan memang. yang menimpa masyarakat Indonesia saat ini telah membawa kepada keterpurukan mutu kehidupan bangsa. Keterpurukan tersebut diindikasikan pula oleh merosotnya mutu sumber daya manusia Indonesia yang semakin rendah dan semakin merosot. Kemerosotan tersebut menunjukkan pula rendahnya mutu pendidikan Indonesia. Gerakan reformasi untuk membangun masyarakat Indonesia baru, meminta pendidikan yang bermutu serta merata, khususnya *out put* pendidikan kita yang berkualitas.

Ini sesungguhnya adalah bagian problematika dari pendidikan. Dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.¹

Pendidikan adalah mengajarkan sesuatu kepada peserta didik sebagai konsekuensi logis kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, makhluk moral. Sedang menurut Ngilim purwanto adalah segala usaha orang dewasa dalam

¹ Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (PT Kloang Klede Putra Timur, tahun 2003) hlm 3.

pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan.²

Dalam upaya mengembangkan cita-cita diatas, perlu adanya sebuah pemahaman bahwa profesionalisme yang harus dimiliki seorang guru, paling tidak merupakan syarat mutlak yang harus diterapkan sebagai sebuah solusi problematika pendidikan dewasa ini.

Al Qur'an memandang pendidikan merupakan sesuatu yang sangat inti dalam kehidupan. Disamping itu, pendidikan juga merupakan hal yang penting bagi setiap individu dan masyarakat. Pentingnya pendidikan ini tidak hanya terbatas kepada suatu umat, bangsa, masyarakat atau pada masa tertentu, tetapi pendidikan mencakup seluruh umat dan masyarakat Islam dewasa ini.³

Untuk memperoleh hasil belajar tersebut keberadaan guru sangat penting dalam proses Pendidikan. Dipundaknya pendidik terlatak tanggung jawab yang amat besar dalam upaya mengantarkan peserta didik ke arah tujuan Pendidikan yang dicita-citakan, tugas guru sebagai profesi, meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan ketrampilan-ketrampilan pada siswa.⁴

Guru sebagai salah satu unsur di bidang kependidikan harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru itu terletak tanggung jawab untuk membawa peserta didiknya pada suatu taraf kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Dalam rangka ini guru tidak semata-mata sebagai “pengajar” yang *transfer of knowledge*, tetapi juga sebagai “pendidik” yang

² Nglim Purwanto. *Ilmu Pendidikan teoritis dan Praktis*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 10

³ Abdurrahman .AR, *Pendidikan Di Alaf Baru*, (Yogyakarta, Prisma Sophie: 2003) hlm. 60 - 61

⁴ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1985), hlm. 5

transfer of values dan sekaligus sebagai “pembimbing” yang memberikan pengarahan dan menentukan peserta didik dalam belajar.⁵

Guru dituntut untuk bekerja keras, cekatan, terampil, ahli, disiplin, tinggi dalam meningkatkan pelaksanaan kerjanya sebagai profesi disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar, yang menghendaki adanya suatu peningkatan dalam profesi sesuai bidangnya masing-masing. Para guru sebagai tenaga profesional juga harus mampu berpacu dalam menghadapi arus dalam segala bentuk perubahan dan kemajuan dalam masyarakat.

Sebagai guru harus mampu fungsi dan tugasnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 84⁶

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرِيقٌ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا (الاسراء: 84)

“Katakanlah “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.” (QS: Al-Isro’:84)

Oleh karena itu seorang guru di tuntut untuk bekerja keras, gigih, tekun dan menguasai bidangnya masing-masing agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik serta dapat mencapai tujuan yang di cita-citakan. Guru sebagai pengajar harus menjadi teladan dan panutan bagi peserta didik di dalam maupun diluar sekolah.

Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat dilingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan.⁷ Oleh karena itu seorang guru selain mempunyai kompetensi dalam proses belajar mengajar juga harus mempunyai kepribadian. Apalagi bagi guru Pendidikan Agama Islam, beban yang ditanggungnya tidaklah ringan karena disamping ia dituntut un memiliki kepribadian guru, ia juga harus mempunyai kepribadian yang sesuai dengan

⁵ Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Cet IX, hlm. 123.

⁶ Soenarjo dkk, *Al Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: Penerbit Toha Putra, 1998) hlm. 232.

⁷ Moh Uzer Usman, *op.cit*, hlm. 7.

ajaran islam.⁸ Maksudnya selain tuntutan akan kepribadian yang terikat oleh kode etik keguruan sebagaimana umumnya, ia juga dituntut untuk memiliki kepribadian utama (kepribadian muslim dengan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari).

Padahal jika kita bisa sedikit membuka mata nurani maka pekerjaan sebagai guru adalah pekerjaan yang luhur dan mulia baik ditinjau dari sudut masyarakat dari negara maupun ditinjau dari sudut keagamaan. Guru sebagai pendidik adalah seorang yang berjasa besar terhadap masyarakat dan negara. Tinggi atau rendahnya kebudayaan suatu masyarakat, maju atau mundurnya tingkat kebudayaan suatu masyarakat dan negara, sebagian besar bergantung kepada pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh guru-guru.⁹

Makin tinggi pendidikan guru makin baik mutu pendidikan dan pengajaran yang diterima oleh anak-anak dan makin tinggi pula derajat masyarakat. Oleh sebab itu, guru harus berkeyakinan dan bangga bahwa ia dapat menjalankan tugas itu. Guru hendaknya berusaha menjalankan tugas kewajiban sebaik-baiknya sehingga dengan demikian masyarakat menginsafi sungguh-sungguh betapa berat dan mulianya pekerjaan guru.¹⁰ Artinya predikat guru adalah memang benar-benar memiliki konsekuensi logis baik terhadap masyarakat pendidikan ataupun masyarakat pada komunitas yang lain.

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul: "Studi Kebijaksanaan Pemerintah Tentang Undang-undang Guru dan Dosen tentang Guru Relevansinyan Terhadap Kompetensi Guru PAI (Telaah Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen)"

⁸ Zakiyah Daradjat, dkk, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1996), hlm. 98.

⁹ M. Ngalim Purwanto. *OP Cit*, hlm. 138

¹⁰ *Ibid*, hlm. 139

B. PENEGASAN ISTILAH

Untuk menghindari bias pemahaman, maka di pandang penulis perlu untuk memberikan batasan-batasan istilah sebagai penegasan judul di atas. Dalam bab ini dikemukakan mengenai pokok-pokok istilah sebagai berikut :

1. Studi Kebijakan

- a. Studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaah. (kasus pendkatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam).¹¹
- b. Kebijakan pemerintah adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (pemerinah, organisasi, dan lain sebagainya).¹²

Jadi study kebijakan pemerintah disini adalah sebuah analisis atau telaah rangkaian konsep dan asas dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan yang di buat pemerintah. Dalam hal ini Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

2. Undang-undang Guru dan Dosen

Pada 30 Desember 2005 pemerintah telah mensahkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu sesuatu undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban guru dan dosen di indonesia

3. Relevansi adalah berasal dari kata relevan yang berarti kait mengkait; bersangkutan pasti; berguna secara langsung. Sedangkan relevansi adalah hubungan, kaitan.¹³

4. Kompetensi guru PAI

Kompetensi menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (W.J.S. Purwadarminta) kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi Ke-III, hlm. 1093.

¹² *Ibid*, hlm. 149

¹³ *Ibid*, hlm. 461.

menentukan atau memutuskan sesuatu. Pengertian dasar kompetensi (*competency*) yakni kemampuan atau kecakapan.¹⁴

Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik.¹⁵ Sedang Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang terkandung dalam agama Islam secara keseluruhan, memahami makna, maksud serta sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak.¹⁶ Jadi guru pendidikan agama Islam adalah seseorang yang dengan kemampuannya mengajarkan ajaran agar Islam kepada peserta didik

Kompetensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh guru PAI yang sesuai dengan UU Guru dan Dosen Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi

Dalam penelitian ini, yaitu mencari relevansi atau keterpaduan antara UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV tentang guru dengan Kompetensi Guru PAI

C. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berangkat dari latar belakang dan penegasan judul diatas maka dapat peneliti kemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen?
2. Bagaimana relevansi kebijakan pemerintah dalam UU No. 14 Tahun 2005 terhadap peningkatan kompetensi guru PAI?

¹⁴ Syafrudin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta : Ciputat Press, 2002), hlm. 15

¹⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *op.cit.*, hlm. 31

¹⁶ Muslam, *Pengembangan Kurikulum PAI Teoritis dan Praktis*, (Semarang : PKPI2, 2004). Hlm. 8

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penulisan skripsi

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Untuk mengetahui relevansi kebijakan pemerintah dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru terhadap peningkatan kompetensi guru PAI.

2. Manfaat penulisan skripsi.

Nilai guna yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Sebagai upaya akademik dalam rangka mengembangkan wawasan keilmuan terutama dalam bidang pendidikan.
- b. Sebagai upaya memberi sumbangan pemikiran kepada lembaga penilaian tentang standar penilaian pembelajaran yang harus dimiliki dan diperhatikan oleh seorang guru.

E. KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka peneliti mengambil Data-data yang terkait dengan penelitian ini.

1. Skripsi Neli Hidayati “ sudy kebijakan pemerintah tentang standar pendidik serta relevansinya terhadap profesionalitas Guru PAI (Telaah Pondok Pesantren Salafiyah No 19 tahun 2005 Bab VI tentang SNP) dalam skripsi ini berisi untuk memenuhi standar nasional pendidikan dalam PP NSP No 19 Tahun 2005 ditetapkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi akademik sebagai agen pembelajaran serata memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam arti bahwa setiap pendidik di setiap jenjang pendidikan harus memiliki kualifikasi minimal D4 atau sarjana (SI) pada bidang/program pendidikan yang sesuai dengan bidang yang diajarkan atau sesuai dengan jenjang tempat mengajar, dan harus pula memiliki sertifikat profesi guru (pasal 29). Sedangkan bagi pendidik yang tidak

pernah mengenyam pendidikan D4 atau sarjana strata 1 (SI) tetapi memiliki keahlian dalam pendidikan, maka ia harus melewati uji kelayakan dan kesetaraan, bila ingin jadi pendidik, serta mempunyai kompetensi diantaranya kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

2. Skripsi Aris Syaiful Huda dengan judul IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA DALAM UU SISDIKNAS TAHUN 2003 (Studi Kasus di SMP 4 Bae Kudus T.A. 2003-2004)” di dalam skripsi di peroleh penemuan bahwa: Ada relevansi yang erat antara kemampuan sekolah untuk mengimplementasikan pendidikan agama dengan penerapan UU SISDIKNAS Tahun 2003. Potensi yang besar yang dimiliki oleh SMP 4 Bae Kudus seperti : kesiapan kultur masyarakat, tanggapan positif dari semua guru, kesiapan siswa yang sangat responsif menanggapi perundang-undangan tersebut adalah modal yang sangat besar dalam pengimplementasian Pendidikan Agama dalam UU SISDIKNAS Tahun 2003. Sedangkan problem dan hambatan dibagi menjadi dua bagian yaitu problem internal yaitu problem yang dihadapi sekolah antara lain problem pengadaan guru agama Kristen serta kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Dan problem guru dalam pengajaran yaitu tingkat pemahaman siswa yang berbeda. Kemudian bagian kedua adalah problem eksternal yaitu problem siswa dan problem orang tua. Problem siswa yang beragama kristen yaitu tidak mempunyai guru agama Kristen dan problem siswa yang beragama kristen berbedanya tingkat pemahaman siswa kemudian tidak ada jam pelajaran tambahan. Sedangkan problem orang tua yaitu sibuknya orang tua dengan pekerjaannya sehingga kurang dapat mengontrol anak-anaknya.
3. Skripsi Abdul Syukur yang berjudul prinsip profesionalitas menurut UU Guru dan Dosen dalam perspektif pendidikan Islam adi dalamnya berisi prinsip profesionalitas menurut UU Guru dan Dosen dalam perspektif pendidikan Islam sangat memberi peluang terlaksananya nilai-nilai Al-Qur'an yang menjadi tujuan PAI.

4. Skripsi Kompetensi Profesional Guru Mata Pelajaran Fiqih di MA Banjarnegara Tahun 2005. oleh Munifah 310007 Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai kompetensi profesional guru mata pelajaran Fiqih di MA Banjarnegara yang meliputi kompetensi dalam pengelolaan program pembelajaran, pengelolaan kelas, penggunaan media/ sumber belajar dan penilaian prestasi peserta didik untuk kepentingan pendidikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa guru mata pelajaran Fiqih di MA Banjarnegara umumnya mempunyai kompetensi profesional yang baik. Hal tersebut dilihat dari kompetensi guru dalam pengelolaan program pembelajaran yang meliputi penyusunan rencana pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran menunjukkan kompetensi yang baik. Dimana perencanaan yang disusun oleh guru telah sesuai dengan prosedur penyusunan satuan/ rencana pembelajaran. Walaupun demikian, ada sebagian guru di masyarakat yang tidak membuat rencana pembelajaran. Guru hanya membuat draft catatan mengenai apa yang akan diajarkan dan belum teradministrasi dengan baik. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru juga telah sesuai dengan rencana yang disusun. Dan dilihat dari pengalaman mengajar guru, menunjukkan ada perbedaan antara guru yang sudah lama mengajar dengan guru yang baru. Guru yang telah lama mengajar dalam memotivasi peserta didik lebih familier, supel dan meresap bagi peserta didik serta mampu mengkondisikan peserta didik. Dalam pengelolaan kelas menunjukkan kompetensi yang baik, hal ini dilihat dari pengaturan tata ruang kelas yang memadai untuk pembelajaran dan penciptaan iklim belajar-mengajar yang serasi. Dan jika ditinjau dari pengalaman mengajarnya, menunjukkan perbedaan. Kompetensi guru mata pelajaran Fiqih di MA Banjarnegara dalam penggunaan media/ sumber belajar menunjukkan kompetensi yang cukup baik. Guru telah menggunakan berbagai media/ sumber belajar seperti buku paket, papan tulis/ white board, kapur/ spidol, buku lain atau kitab yang relevan dan alat peraga dan sumber belajar yang ada di lingkungan madrasah. Dan dilihat dari segi pengalaman mengajar yang dimiliki guru menunjukkan

perbedaan. Kompetensi guru mata pelajaran Fikih di MA Banjarnegara dalam penilaian prestasi peserta didik untuk kepentingan pendidikan juga menunjukkan kompetensi yang baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan evaluasi guru, kesesuaian alat evaluasi dengan indikator yang telah ditetapkan, pemberian pre tes dan post tes, pemeriksaan dan pemberian skor, kriteria penilaian hasil belajar dan pengolahan hasil penilaian, menganalisis hasil penilaian dan menyimpulkan serta pembuatan laporan hasil penilaian..

Untuk membedakan Skripsi ini dengan karya tulis yang lain maka peneliti memfokuskan pada kebijakan pemerintah dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Dosen Bab IV tentang guru serta relevansinya terhadap kompetensi guru PAI

F. METODE PENELITIAN.

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.¹⁷ Pendekatan dalam analisis kebijakan pada dasarnya meliputi dua bagian besar yaitu “pendekatan deskriptif dan normatif”.

- a. *Pendekatan deskriptif* adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan oleh peneliti dalam ilmu pengetahuan untuk menerangkan suatu yang terjadi di masyarakat. Tujuan pendekatan ini adalah mengemukakan penafsiran yang besar secara ilmiah mengenai gejala kemasyarakatan agar diperoleh kesepakatan umum mengenai permasalahan yang disoroti.
- b. *Pendekatan normatif* merupakan upaya dalam ilmu pengetahuan untuk menawarkan suatu norma, kaidah/resep yang dapat digunakan oleh pemakai dalam rangka memecahkan suatu

¹⁷ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), Cccct. II, hlm. 36.

masalah. Tujuan pendekatan ini adalah membantu mempermudah pemakai hasil penelitian dalam menentukan salah satu cara dari beberapa pilihan cara/prosedur yang paling efektif dalam menangani/memecahkan suatu masalah,

2. Metode Pengumpulan Data.

Secara metodologis, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu researt kepustakaan atau penelitian murni¹⁸. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-daata atau informasi yang berkaitan dengan kajian ini baik itu berupa buku-buku, makalah, jurnal dan lain sebagainya.

3. Metode Analisis Data

Setelah memperoleh data-data dari perpustakaan peneliti mengklasifikasikan atau mengelompokkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, setelah itu data-data disusun, dikelaskan kemudian dengan menggunakan metode berikut yaitu:

a. Content Analisis

Dalam *content analysis* peneliti akan mengungkapkan bahwa *content analysis* adalah isi dari tema yang peneliti bahas, kemudian perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah direncanakan.¹⁹ Dalam hal ini peneliti, mengungkapkan kompetensi guru PAI dan Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

c. Metode Deduktif,

Metode Deduktif yaitu metode untuk menganalisis hal-hal yang bersifat umum ditarik ke hal-hal yang bersifat khusus.²⁰ Dalam hal ini peneliti mengungkapkan tentang kompetensi guru pendidikan

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Researt*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 9

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi I, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 49.

²⁰ John W. Best, Terj. Drs. Sanapiyah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm.13-14.

Islam dan Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, kemudian di cari hubungan keduanya.

d. Metode Reflektif thinking

Metode Reflektif thinking yaitu berfikir yang prosesnya mondar-mandir antara yang emperi dengan yang abstrak. Emperi yang khusus dapat saja menstimulasi berkembangnya konsep yang abstrak yang luas, dan menjadikan mampu melihat relevansi emperi pertama dengan emperi-emperi yang lain yang termuat dalam konsep abstrak baru yang dibangunnya.²¹

Metode ini dipakai untuk mencari relevansi antara Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dengan Kompetensi guru PAI.

²¹ Noeng Muhadjir, *Op. Cit*, hlm.66-67.

BAB II

KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

A. Guru Dalam Pendidikan Islam

1 Pengertian guru Pendidikan Islam

Dalam pendidikan Islam, guru memiliki arti dan peranan yang sangat penting, hal ini disebabkan ia memiliki tanggung jawab dan menentukan arah pendidikan. Itulah sebabnya Islam sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan dan bertugas sebagai guru/pendidik. Islam mengangkat derajat mereka dan memuliakan mereka melebihi dari pada orang Islam lainnya yang tidak berilmu pengetahuan dan bukan pendidik. Firman Allah SWT dalam surat Al Mujadalah ayat 11 :

... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ... (المجادلة : 11)

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (QS. AL Mujadalah:11) ¹

Bahkan orang-orang yang berilmu pengetahuan dan mau mengajarkan ilmunya kepada mereka yang membutuhkan akan disukai oleh Allah SWT dan dido'akan oleh penghuni langit, penghuni bumi seperti semut dan ikan di dalam laut agar ia mendapat keselamatan dan kebahagiaan.

Demikianlah keberuntungan yang dimiliki oleh orang yang berilmu pengetahuan dan mau mengajarkan ilmunya kepada orang lain dalam hal kebaikan. Sehubungan dengan itu Islam menghimbau kepada orang yang berilmu untuk suka mengamalkan ilmunya kepada orang lain.

¹Soenarjo dkk, *Al Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: Penerbit Toha Putra, 1998) hlm. 910-911.

Sedangkan pengertian tentang guru / pendidik menurut tokoh Barat antara lain dikemukakan oleh Pullias and James D. Young. Ia mengemukakan bahwa:

*The teacher is "learned" . He should know more than his student. However, he recognizes that he does not know everthing, and he is mainly a learner. The teacher is an example to his students. Yet, he also makes mistakes; he is human. The teacher should be objective, but the teacher-student relationship is so close that it often may be difficult to be objective.*²

Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumberdaya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu guru merupakan salah satu unsur dibidang kependidikan harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang.³

Di sisi lain Uzer Usman memberikan pengerian spesifik tentang guru yaitu sebagai jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Dengan kata lain, pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian khusus melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru.

Sedangkan Pendidikan Islam ialah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam.

Guru adalah orang tua kedua yang ikut bertanggung jawab dan memperhatikan keberhasilan pendidikan anak, dengan semangat berjuang memberikan bimbingan, pengajaran, pengawasan serta senantiasa memantau anak didiknya demi tercapainya pendidikan mereka sehingga perlu guru membina perkembangan anak didiknya tiada berbeda dengan

² Earl V. Pullias and James D. Young, *Teacher is Many Things*, (USA: Fawcett, 1968), hlm. 14

³ Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 123

anak kandungnya sendiri. Sebagaimana yang dituliskan Az-Zarnuji dalam kitabnya *Ta'lim Muta'lim* yang intinya adalah :

فَأَنْ مِنْ عِلْمِكَ حَرْفًا مِمَّا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الدِّينِ فَهُوَ أَبُوكَ فِي الدِّينِ

*“ sesungguhnya orang yang mengajarmu walau satu huruf saja yang berguna bagi ajaran agama maka dia adalah orang tuamu ”*⁴

Jadi guru Pendidikan Islam merupakan orang yang melakukan kegiatan bimbingan pengajaran atau latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan pembelajaran (menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat.

Agar pendidik berhasil melaksanakan tugasnya, Imam Al Ghozali menyarankan pendidik memiliki adab yang baik. Hal ini disebabkan anak didik itu akan selalu melihat kepadanya sebagai contoh yang harus selalu diikutinya. Al Ghozali berkata : *“Mata anak didik selalu tertuju kepadanya (guru), telinganya selalu menganggap baik berarti pula di sisi mereka dan apabila ia menganggap jelek berarti jelek pula di sisi mereka”*⁵

2 Syarat-Seorang Guru Pendidikan Islam

Di kalangan masyarakat saat ini, profesi guru masih banyak dibicarakan orang, terutama pada realitas kepahitan yang dialami guru, misalnya ketika masyarakat menganggap rendahnya profesi guru yang diikuti dengan anggapan bahwa tingkat kompetensi profesi guru masih rendah. Agar profesi guru dapat terhindar dari pandangan-pandangan semacam yang disebutkan di atas, demi kelancaran guru dalam menjalankan tugasnya sebagai guru yang baik, maka diperlukan syarat tertentu bagi seorang guru.

⁴ Az-Zarnuji, *Ta'lim Muta'lim*, (Semarang: Al-Alawiyah, t.th) hlm. 17.

⁵ Team Penyusun Departemen Agama RI, *Filsafat Pendidikan Islam*, tahun 1984, hlm.

Beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu :

- a. Persyaratan administratif, meliputi soal kewarganegaraan, umur, berkelakuan baik dan mengajukan permohonan.
- b. Persyaratan teknis, ada yang bersifat formal yakni harus berpendidikan guru, dan syarat-syarat yang lain yaitu seorang guru harus menguasai cara dan teknik mengajar, trampil menyusun atau mendesain program pengajaran serta memiliki motivasi dan cita-cita memajukan pendidikan.
- c. Syarat psikis, yaitu kaitannya dengan kesehatan rohaniyah, matang dalam berfikir dan bertindak, mampu mengendalikan nafsu, sabar, ramah dan sopan memiliki jiwa kepemimpinan konsekuen dan berani bertanggung jawab serta memiliki jiwa pengabdian.
- d. Persyaratan fisik, yaitu menyangkut aktivitas selama mengajar di kelas dan kegiatan lainnya di sekolah, kesehatan dan kekuatan dalam aspek fisik amat dibutuhkan. Dalam hal ini juga menyangkut masalah kerapian dan kebersihan.⁶

Selain pendapat di atas, ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat menjadi guru yang baik dan bertanggung jawab, yaitu taqwa kepada Allah, berilmu pengetahuan, sehat jasmani dan berkelakuan baik.⁷

Dari kedua pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk menjadi seorang guru Pendidikan Islam yang dapat mengajar dan mendidik dengan baik seorang guru harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut : pertama, sehat jasmani dan rohani; kedua, memiliki kepribadian; ketiga, beriman dan bertaqwa serta memiliki ilmu pengetahuan yang luas; keempat, secara formal memiliki wewenang untuk mengajar (secara administratif).

⁶A. Samana, *Profesionalisme Keguruan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 124-125.

⁷Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1992), hlm. 41-42.

Untuk lebih menyempurnakan syarat-syarat menjadi seorang guru Pendidikan Islam yang lebih khusus peneliti mengutip pendapat Athiyah Al-Abrosyi (1993) yang mengemukakan beberapa sifat yang harus dimiliki guru Pendidikan Islam, yaitu :

- a. Zuhud, artinya tidak mengutamakan materi sebagai tujuan dalam pendidikan, tetapi lebih mementingkan keridhoan Allah SWT.
- b. Keberhasilan guru, artinya seorang guru hendaklah bersih dari segala penilaian yang negatif baik yang menyangkut jasmani maupun rohani.
- c. Ikhlas dalam pekerjaan, artinya segala aktivitas yang menyangkut tentang proses belajar mengajar dilakukan dengan penuh kegembiraan.
- d. Bertanggung jawab, artinya sebelum menjadi seorang guru, dia harus menjadi seorang bapak.
- e. Suka pemaaf, artinya dapat mengendalikan emosionalnya.
- f. Harus mengetahui tabiat murid, latar belakang murid dan keadaan murid.
- g. Harus menguasai mata pelajaran dan mampu mengembangkan kreatifitas dalam diri siswa sebagai inovasi baru.⁸

Dari berbagai syarat yang dikemukakan di atas, mau tidak mau guru Pendidikan Islam harus dapat mensosialisasikan dirinya, karena ini penting untuk mencapai tujuan Pendidikan Islam itu sendiri sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
(التوبة: 122)

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya".⁹

Dengan demikian jelaslah bahwa seorang guru harus bekerja sesuai dengan disiplin ilmunya serta memiliki wawasan yang luas tentang

⁸Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 188-189.

⁹Soenarjo. *Op. Cit*, hlm. 302.

berbagai ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Mengingat betapa pentingnya peranan seorang Guru Pendidikan Islam dalam pendidikan serta perkembangan akhlak seorang siswa, maka seorang Guru Pendidikan Islam dituntut untuk memahami kriteria jenis akhlaknya antara lain: mencintai jabatannya, berikap adil, berwibawa, selalu gembira, sabar, manusiawi dan bersifat gotong royong serta dapat bekerja sama dengan masyarakat.¹⁰

3 Tugas Seorang Guru Pendidikan Islam

Mengenai tugas guru, ahli-ahli pendidikan Islam juga ahli pendidikan barat telah sepakat bahwa tugas guru adalah mendidik. Mendidik adalah yang amat luas, mendidik sebagian besar dilakukan dalam bentuk mengajar, memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberi contoh, membiasakan dan lain-lain. Dalam pendidikan di sekolah tugas guru sebagian besar adalah mendidik dengan cara mengajar. Dalam literatur barat diuraikan tugas-tugas guru selain mengajar ialah berbagai macam tugas yang sesungguhnya bersangkutan dengan mengajar, yaitu tugas membuat persiapan mengajar, tugas mengevaluasi hasil belajar dan lain-lain yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan pengajaran. AG. Soejono (1982 : 62) merinci tugas pendidik (termasuk guru) sebagai berikut:

- a. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak-anak didik dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, melalui pergaulan, angket dan sebagainya.
- b. Berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan yang baik menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang.
- c. Memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian, ketrampilan agar anak didik memilihnya dengan tepat.
- d. Mengadakan evaluasi setiap waktu
- e. Memberikan bimbingan dan penyuluhan.¹¹

¹⁰Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung,Pustaka Setia, 1995), hlm. 81-82.

¹¹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1992), Cet.1, hlm. 78-79.

Dalam tugas tersebut di atas tidak disebutkan dengan jelas tugas guru yang terpenting yaitu mengajar. Sementara dalam batasan lain, tugas pendidik dapat dijabarkan dalam beberapa pokok pikiran yaitu:

- a. Sebagai pengajar (instruksional) yang bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang disusun dan akhirnya dengan pelaksanaan penilaian setelah program tersebut dilaksanakan.
- b. Sebagai pendidik (edukator) yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan kepribadian sempurna (insan kamil) seiring dengan tujuan penciptaannya.
- c. Sebagai pemimpin (managerial) yang memimpin, mengendalikan diri (baik diri sendiri, peserta didik, maupun masyarakat), upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan dan partisipasi atas program yang dilakukan.¹²

Tugas guru tidak sekedar mengajarkan bahan bidang studi keahliannya, tapi juga bertugas sebagai tenaga ahli kependidikan di bidang perencanaan dan pengembangan kurikulum. Dengan ketrampilannya menentukan jenis bidang studi itu, guru akan memperoleh kemampuan yang lebih mendalam tentang menyeleksi bahan bidang studi yang paling dibutuhkan oleh masyarakat.¹³

Hujjatul Islam, imam al-Ghazali mengemukakan bahwa tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan mensucikan serta membawa hati menjadi yang *taqorrub ila Allah*. Para pendidik hendaknya mengarahkan peserta didik untuk mengenal Allah lebih dekat melalui seluruh ciptaan-Nya. Para pendidik dituntut untuk dapat mensucikan jiwa peserta didik. Hanya dengan jiwa-jiwa yang suci manusia akan dekat dengan khaliqnya. Berkenaan dengan konsep ini, an-Nahlawi menyimpulkan bahwa selain bertugas mengalihkan berbagai pengetahuan dan ketrampilan kepada peserta didik, tugas utama yang perlu dilakukan pendidik adalah *tazkiyat an-nafs*, yaitu mengembangkan, membersihkan, mengangkat jiwa peserta didik kepada Khaliqnya, menjauhkannya dari kejahatan dan menjaganya agar tetap berada pada fitrah yang hanif.¹⁴

Tugas guru menjadi pendidik dan pengajar di zaman sekarang tidak mudah, tantangan begitu banyak dan besar, misalnya, anak didik

¹² Al-Rasyidin, dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan-Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005), Cet.II., hlm. 44.

¹³ Cece Wijaya dan A. Tabrani Rusyan, *Kemampuan Dasar guru dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 50.

¹⁴ Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, *op.cit.*, hlm. 50.

tidak mau diatur, semangat belajar rendah, maunya dari yang mengenakan, daya juang kecil. Di beberapa tempat anak didik suka tawuran, berantem dan menjadi korban narkoba. Tantangan menjadi lebih berat lagi karena kesejahteraan guru di negara ini memang rendah sehingga makin berat bagi guru untuk dapat menjalankan tugas menjadi secara baik.

Oleh karena tugas itu begitu berat, agar dapat tetap jalan dibutuhkan guru mengembangkan sikap-sikap dan semangat berikut:

a. Cinta kepada siswa

Menjadi pendidik yang baik di zaman yang sulit ini hanya mungkin bila kita sungguh mencintai anak didik dan jujur ingin membantu mereka untuk berkembang dan maju.

b. Menghargai nilai kemanusiaan lebih dari aturan formal

Sikap penghargaan nilai kemanusiaan itu kiranya perlu menjadi nilai dan sikap yang dipunyai guru atau dikembangkan dalam hidup seseorang guru, terlebih di alam Indonesia sekarang ini. Sikap itu pertama-tama harus nampak dalam sikap guru terhadap siswa dan juga dalam aturan sekolah.

c. Sikap membebaskan dan bukan membelenggu

Banyak guru atau pendidik yang suka berlaku sebagai diktator, suka memaksakan kehendaknya kepada anak didik dan bahkan dengan kekerasan. Dalam sistem seperti itu anak didik akan takut, pasif dan tidak berkembang menjadi pribadi yang bebas.¹⁵

Guru merupakan profesi/jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan walaupun kenyataannya masih dilakukan orang di luar kependidikan. Itulah sebabnya jenis profesi ini paling muda terkena pencemaran. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti

¹⁵ Paul Suparno, *Guru Demokrasi di Era Reformasi Pendidikan*, (Jakarta: PT, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 90-96.

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan ketrampilan-ketrampilan pada siswa.

Tugas dan peran guru tidaklah terbatas di dalam masyarakat, bahkan guru pada hakikatnya merupakan komponen strategis yang memilih peran yang penting dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa. Semakin akurat para guru melaksanakan tugasnya semakin terjamin tercipta dan terbinanya kesiapan dan keandalan seseorang sebagai manusia pembangunan.¹⁶

Menurut al-Ghazali dikutip oleh Abudin Nata, ciri-ciri guru yang baik adalah:

- a. Guru harus mencintai muridnya seperti mencintai anak kandungnya sendiri
- b. Guru jangan mengharapkan materi (upah) sebagai tujuan utama dari pekerjaannya (mengajar) karena mengajar adalah tugas yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW
- c. Guru harus mengingatkan muridnya agar tujuannya dalam menuntut ilmu bukan untuk kebanggaan diri atau mencari keuntungan pribadi tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- d. Guru harus mendorong muridnya agar mencari ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat
- e. Dihadapan muridnya guru harus memberikan contoh yang baik, seperti berjiwa halus, sopan, lapang dada, murah hati dan berakhlak terpuji lainnya
- f. Guru harus mengajarkan pelajaran yang sesuai dengan tingkat intelektual dan daya tangkap anak didiknya
- g. Guru harus mengamalkan yang diajarkannya karena ia menjadi idola di mata anak didiknya
- h. Guru harus memahami minat, bakat dan jiwa anak didiknya sehingga disamping tidak akan salah dalam mendidik juga terjalin hubungan yang akrab antara guru dan anak didiknya
- i. Guru harus dapat menanamkan keimanan kedalam pribadi anak didiknya sehingga akal pikiran anak didik tersebut akan dijiwai oleh keimanan itu.¹⁷

¹⁶ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hlm. 6-7.

¹⁷ Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 163-164.

Tipe ideal guru yang dikehendaki al-Ghazali di atas nampaknya diarahkan kepada aspek moral dan kepribadian guru, sedang aspek keahlian, profesi dan penguasaan terhadap materi yang diajarkan dan metode yang harus dikuasainya nampak kurang diperhatikan. Hal ini mungkin kurang sejalan dengan pola dan pendekatan dalam pendidikan yang diterapkan pada masyarakat modern saat ini.

Dalam profesinya seorang guru memiliki banyak tugas. Moh. Uzer Usman mengelompokkan jenis tugas guru menjadi 3, yaitu tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan dan tugas dalam bidang kemasyarakatan.

Secara singkat Moh. Uzer Usman menggambarkan tugas guru melalui bagan sebagai berikut :¹⁸

Dalam agama Islam tugas seorang guru sangat penting. Kenapa guru pendidikan agama dianggap penting ?, karena masa depan dan baik buruknya akhlak seorang anak didik sangat tergantung kepada guru Pendidikan Islam. Guru Pendidikan Islam yang bijaksana tentunya dapat dan akan membimbing anak didiknya ke arah sikap yang positif untuk kehidupannya dikemudian hari. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia dihadirkan di muka bumi ini sebagai khalifah. Kata khalifah secara sederhana menunjuk kepada sekelompok masyarakat yang menggantikan kelompok lainnya.¹⁹

Begitu pula halnya dengan para anak didik, tentunya mereka akan menjadi khalifah atau pewaris-pewaris untuk masa yang akan datang, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naml ayat 62 :

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّكُمْ لَرْءَاوُونَ (النمل : 62)

“Dan menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi ”

(QS. An-Naml : 62).²⁰

¹⁸Moh. Uzer Usman, *op.cit*, hlm. 6-8.

¹⁹Abdurrahman Saleh, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 47.

²⁰Soenarjo, *Op. Cit.* hlm. 601.

Dengan melihat alasan di atas sudah tentu Guru Pendidikan Islam dituntut untuk menjalankan tugasnya semaksimal mungkin. Oleh karena itu seorang Guru Pendidikan Islam sebagai seorang yang profesional, ia harus memenuhi tugas profesional sebagai seorang guru.

Tugas profesional guru Pendidikan Islam itu adalah :

- a. Mampu menetapkan dan merumuskan tujuan intruksional yang ingin dicapai Pendidikan Islam.
- b. Mengetahui dan dapat menggunakan metode mengajar sesuai dengan situasi belajar yang ada.
- c. Memilih dan menguasai bahan.
- d. Menggunakan alat bantu dalam proses belajar mengajar.
- e. Menetapkan dan menilai (mengevaluasi) efektifitas program pengajaran.

Untuk kepentingan tugas profesional, guru dituntut untuk menguasai atau memiliki kemampuan yang bertaraf profesional. Kemampuan guru yang sepenuhnya harus dikuasai guru yang bertaraf profesional, yaitu :

- a. Merencanakan program belajar mengajar
- b. Melaksanakan dan memimpin atau mengelola proses belajar mengajar
- c. Menilai dan mengevaluasi kemampuan kemajuan proses belajar mengajar
- d. Menguasai bahan pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang dipegangnya atau dibidangnya.²¹

Dalam merencanakan program belajar mengajar seorang guru harus mengetahui makna dan tujuan dari rencana program belajar mengajar itu. Selain itu ia juga harus menguasai unsur-unsur yang terdapat dalam proses belajar mengajar secara teoritis maupun praktis.

Kemampuan merencanakan program pengajaran (PBM) merupakan kemampuan sentral dari segala hal yang mendalam tentang

²¹Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995), hlm. 19-20.

obyek belajar mengajar yang didukung oleh penciptaan suasana yang edukatif. Maka dari perencanaan program belajar mengajar adalah suatu proyeksi guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa selama pengajaran itu berlangsung. Sedangkan yang menjadi tujuan program perencanaan belajar mengajar adalah sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan praktek atau tindakan mengajar. Dengan demikian apa yang harus dilaksanakan ataupun dilakukan guru dalam proses belajar mengajar bersumber kepada perencanaan program belajar mengajar yang telah dibuat dan direncanakan sebelumnya.

Mengelola proses belajar mengajar merupakan suatu taraf melaksanakan perencanaan program belajar mengajar. Dalam melaksanakan atau mengelola proses belajar mengajar berkaitan dengan pengetahuan teori tentang belajar mengajar. Misalnya yang menyangkut prinsip-prinsip mengajar, menggunakan alat bantu pengajaran, menggunakan metode mengajar, mengevaluasi pembelajaran dan sebagainya.

Dalam melaksanakan program belajar mengajar guru harus mampu menguasai teknik evaluasi guna mengukur sejauhmana proses yang direncanakan itu mampu diserap oleh siswa dalam arti keberhasilannya. Selain itu bermanfaat pula untuk mengetahui beberapa kemajuan atau justru kemunduran yang dicapai oleh siswa dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu kompetensi ini penting untuk dikuasai oleh guru profesional, tanpa itu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan atau siswa mengetahui dan memahami pelajaran yang ia sampaikan Islamkan. Dan yang lebih penting guru untuk menguasai teknik evaluasi adalah untuk *feed back* atau umpan balik dari seluruh proses belajar mengajar yang disampaikan.²²

Sebelum melaksanakan kegiatan di atas secara operasional, terlebih dahulu seorang guru harus menguasai bahan pelajaran yang akan

²²Muhammad Ali, *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), hlm. 113.

disampaikan dalam kelas (proses belajar mengajar). Tugas yang ke-empat inipun juga mutlak untuk dilaksanakan guru. Jadi dari berbagai tuntutan kompetensi yang disebutkan di atas pada dasarnya harus dilaksanakan sepenuhnya oleh guru profesional tanpa menganggap salah satu lebih penting dari yang lainnya.

4 Peran Guru

Ketika ilmu pengetahuan masih terbatas; ketika penemuan hasil teknologi belum berkembang hebat seperti sekarang ini, maka peran utama guru di sekolah adalah menyampaikan ilmu pengetahuan sebagai warisan kebudayaan manusia masa lalu yang dianggap berguna sehingga harus diwariskan. Dalam kondisi yang demikian guru berperan sebagai sumber belajar (*learning resources*) bagi siswa-siswa akan belajar apa yang keluar dari mulut guru. Oleh karena itu ada pepatah yang menyebutkan bagaimana pintarnya siswa, maka tidak mungkin mengalahkan pintarnya guru. Guru dalam proses belajar mengajar mempunyai peran yang sangat penting. Bagaimana hebatnya kemajuan teknologi, peran guru akan tetap diperlukan.²³

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, perkembangan baru terhadap pandangan belajar membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya karena proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa sebagai besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal.²⁴

Dengan demikian semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Minat, bakat, kemampuan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidak akan berkembang

²³ Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (jkt: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. 2, hlm. 147.

²⁴ Moh. Uzzer Usman, *op.cit*, hlm. 9.

secara optimal tanpa bantaun guru. Dalam kaitan ini guru perlu memperhatikan secara optimal tanpa bantau guru. Dalam kaitan ini guru perlu memperhatikan peserta didik secara individual, karena antara satu peserta didik dengan yang lain memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Guru juga harus berpacu dalam pembelajaran, dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik, agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dalam hal ini guru harus kreatif, profesional dan menyenangkan dengan memposisinya diri sebagai:

- a. Orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didiknya
- b. Teman, tempat mengadu, dan mengutarakan perasaan bagi para peserta didik
- c. Fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan dan melayani peserta didik sesuai minat, kemampuan dan bakatnya
- d. Memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi anak dan memberikan saran pemecahannya.
- e. Memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawab.
- f. Membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan (bersilaturahmi) dengan orang lain secara wajar.
- g. Mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antar peserta didik, orang lain dan lingkungannya.
- h. Mengembangkan kreatifitas.
- i. Menjadi pembantu ketika diperlukan.²⁵

Sedangkan pada masa klasik, guru memegang peranan yang penting dalam proses pendidikan anak, mulai dari menentukan perencanaan sampai melaksanakannya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bila pada masa ini disebut dengan *teacher oriented*. Selain itu, guru pada masa ini secara teratur sudah melaksanakan tugas dan

²⁵ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, tth.), hlm. 35-36.

memberikan secara sungguh-sungguh dan memperlakukan murid secara adil tanpa ada diskriminasi.²⁶

Sebagian besar orang menganggap bahwa guru adalah orang yang membantu orang lain belajar. Ia tidak hanya menerangkan, memilih, melatih, memberi ceramah tetapi juga mendesain materi pelajaran. Membuat pekerjaan rumah, mengevaluasi prestasi siswa dan mengatur kedisiplinan. Selain itu mereka juga harus menyimpan buku catatan, mengatur kelas, menciptakan pengalaman belajar, berbicara dengan orang tua, dan membimbing siswa.

Seorang guru mempunyai banyak peranan antara lain:²⁷

a. Guru sebagai ahli instruksional

Guru sebagai ahli intruksional berarti ia harus membuat keputusan tentang materi pelajaran dan metodenya, yang mana hal ini didasarkan pada sejumlah faktor, antara lain mata pelajaran yang akan disampaikan, kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki siswa serta seluruh tujuan yang akan dicapai.

b. Guru sebagai motivator

Salah satu peranan guruyang paling penting adalah sebagai motivator; untuk memenuhi keinginan siswa dapat dibuat papan yang bisa diisi oleh siswa sendiri misalnya, karangan, gambar, lukisan, lelucon dan sebagainya.

c. Guru sebagai Manajer

Peranan guru sebagai manajer yakni mengelola kelas yang meliputi: mengawasi kegiatan kelas, mengorganisasi pelajaran, melengkapi formulir-formulir, mempersiapkan tes, menetapkan nilai, mengadakan rapat antara guru dan orang tua murid. Selain itu guru juga dituntut agar dapat mengelola kelas yang lain, meliputi: mengatur lingkungan belajar yang sehat, bebas dari masalah-masalah, tingkah laku dan lain-lain.

d. Guru sebagai konselor

Peran guru sebagai konselor berarti menuntutnya harus sensitif dan peka terhadap masalah yang sedang dihadapi siswa.

e. Guru sebagai model

Peranan guru sebagai model, berarti seorang guru dituntut sebagai sosok manusia yang segala tingkah lakunya baik disadari ataupun tidak akan dicontoh oleh siswanya.

²⁶ Abudin Nata, (Ed), *Sejarah Pendidikan Islam pada Periode Klasik dan Pertengahan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet.1, hlm. 150.

²⁷ Sri E Stiworthy Djimandono, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2002) hlm 27- 30.

Sementara dalam kriteria yang sama peranan guru menurut Saeful Bhari Djamarah adalah :

a. Korektor

Peran guru sebagai korektor artinya, seorang guru menilai dan mendidik serta mengoreksi semua sikap, tingkah laku dan perbuatan anak didik.

b. Inspirator

Peran guru sebagai inspirator, berarti guru harus dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar anak didik. Misalnya dalam proses belajar sosial, yang mana tentu tidak terlepas dari pergaulan. Dalam pergaulan ini anak akan menemukan beberapa macam masalah yang kompleks, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda, ada yang sensitif, cuek, baik ada yang suka jahil. Ketidakmampuan anak didik terbentur tidak dapat menempatkan dirinya dengan baik, maka akan terjadi konflik yang tidak terelakkan. Meskipun konflik itu harus ada sebagai pelajaran yang sangat berbahaya. Dalam peranannya sebagai inspirator guru memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih khusus sehingga anak didik memahaminya dan akhirnya dapat menyelesaikan masalahnya.

c. Informator

Peran guru sebagai informator berarti guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya di rumah anak didik menonton televisi dan bisa saja anak terpengaruh apa yang ia tonton. Guru sebagai informator, kemudian memberikan informasi baik yang telah ditangkap oleh anak sehingga kesalahan informasi yang mungkin anak didik terima tidak akan menjadikan racun baginya.

d. Organisator

Dalam peranannya sebagai organisator berarti guru mengelola kegiatan akademik, menyusun tata tertib, kalender akademik dan lain-lain.

e. Motivator

Sebagai motivator hendaknya guru dapat mendorong anak didiknya agar bergairah dan aktif belajar.

f. Inisiator

Dalam peranannya sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan pendidikan dan pengajaran.

g. Fasilitator

Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik, seperti menciptakan kegiatan belajar yang sehat dan menyenangkan.

h. Pembimbing

Peran guru sebagai pembimbing berarti guru harus dapat menjadi peraga anak didiknya agar menjadi manusia dewasa yang susila dan mandiri.

i. Demonstrator

Peran guru sebagai demonstrator berarti guru harus menjadi peraga bagi anak didiknya. Apalagi jika muridnya adalah anak pra sekolah (masa etika).

j. Pengelola kelas

Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, sehingga anak didiknya merasa nyaman.

k. Mediator

Peran guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dalam proses belajar anak didik

l. Supervisor

Peran guru sebagai supervisor berarti ia dapat menilai dan memperbaiki secara kritis proses belajar yang telah dilakukan

m. Evaluator

Sebagai evaluator guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik. Sebagai evaluator, guru tidak hanya menilai produk (hasil pengajaran) akan tetapi juga menilai proses (jalanya pengajaran).²⁸

Dalam pendidikan Islam seorang pendidik hendaknya memiliki karakteristik yang dapat membedakannya dari yang lain. Dengan karakteristiknya menjadi ciri dan sifat yang akan menyatu dalam seluruh totalitas dalam kepribadiannya. Totalitas tersebut kemudian akan teraktualisasi melalui seluruh perkataan dan perbuatannya

B. KOMPETENSI YANG HARUS DI MILIKI GURU PAI

Pengertian dasar kompetensi (*competency*) adalah kemampuan atau kecakapan.²⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompetensi berarti kewenangan/kekuasaan untuk menentukan (memutuskan sesuatu).³⁰

Padanan kata yang berasal dari bahasa Inggris ini cukup banyak dan yang lebih relevan dengan pembahasan ini adalah *proficiency and ability* yang memiliki arti kurang lebih sama yaitu kemampuan. Kompetensi merupakan

²⁸ Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1992) hlm. 257.

²⁹ Muhibin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Guru*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 229

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op.cit*, hlm. 584

perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.³¹

Menurut Gordon sebagaimana yang dikutip E. Mulyasa menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*Knowledge*); kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhan.
2. Pemahaman (*Understanding*); yaitu kedalaman kognitif, dan efektif yang dimiliki oleh individu, misalnya seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik, agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien.
3. Kemampuan (*Skill*); adalah sesuatu yang dimiliki individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya kemampuan guru dalam memiliki dan membuat alat peraga sederhana untuk memberi kemudahan belajar kepada peserta didik.
4. Nilai (*Value*); adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku guru dalam pembelajaran (kejujuran., keterbukaan, demokrasi dan lain-lain).
5. Sikap (*Attitude*); yaitu perasaan atau reaksi terhadap sesuatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah.
6. Minat (*Interest*); adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu³²

³¹ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 37

³² *Ibid.*, hlm. 39

Sedangkan tujuan kompetensi guru menurut Sardiman, diantaranya, yaitu :

- a. Guru memiliki kemampuan pribadi, maksudnya guru diharapkan mempunyai pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan serta sikap yang lebih mantap atau, memadai sehingga mampu mengelola PBM dengan baik.
- b. Agar guru menjadi innovator, yaitu tenaga kependidikan yang mampu komitmen terhadap upaya perubahan dan informasi ke arah yang lebih baik
- c. Guru mampu menjadi developer, yaitu guru mempunyai visi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya.³³

Kompetensi menjadi salah satu perangkat yang jangan pernah sampai dilupakan oleh guru professional. Kompetensi adalah kelayakan untuk menjalankan tugas, kemampuan sebagai satu faktor penting bagi guru.³⁴ Kompetensi guru (*teacher competency*) bermakna *the ability of a teacher responsibility perform has or her dutles approapriately* (kompetensi merupakan kemampuan seorang guru ajar dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya diemban secara bertanggung jawab dan layak).³⁵ Seorang guru yang profesional setidaknya-tidaknya memiliki empat kompetensi yaitu:

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, yang meliputi: penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan interaksi belajar mengajar, penilaian prestasi belajar peserta didik.

a. Penyusunan Rencana Pembelajaran

Seorang guru diharuskan memiliki kemampuan dalam merencanakan pengajaran. Sebelum mengajar hendaknya merencanakan program pengajaran, membuat persiapan mengajar yang akan disampaikan, karena dengan perencanaan dan persiapan yang tepat dan baik maka tujuan pengajaran akan lebih terarah dan

³³ *Ibid.*,

³⁴ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung : Alfa Beta, 2004), hlm. 209.

³⁵ Moh. Uzer Usman, *op cit*, hlm. 14.

berhasil.³⁶ Dengan persiapan, guru bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik lebih terarah dan proses pengajaran lebih efektif dan efisien.

Sebuah perencanaan pembelajaran (satuan pembelajaran) yang baik harus memenuhi kriteria yaitu kemampuan dasar dan materi harus mengacu pada silabus, proses belajar harus memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik, terdapat keselarasan antara kemampuan dasar, materi dan alat penilaian, dapat dilaksanakan dan mudah dipahami.³⁷

Pertama mengidentifikasi secara cermat pokok bahasan yang telah digariskan dalam kurikulum GBPP untuk dijadikan “satuan bahasan” yang akan diajarkan.

Kedua, menentukan kelas atau semester dan alokasi waktu yang akan digunakan dalam mengajarkan satuan bahasan yang telah diidentifikasi.

Ketiga, merumuskan Tujuan Intruksional Umum (TIU) atau memindahkan rumusan TIU yang terdapat dalam kurikulum atau GBPP kedalam satuan pelajaran.

Keempat, merumuskan Tujuan Intruksional Khusus (TIK) secara spesifik, operasional, jelas, relevan berdasarkan tujuan intruksional umum.

Kelima, merinci materi pelajaran yang didasarkan kepada bahan pengajaran dalam GBPP dan TIK yang hendak dicapai.

Keenam, merencanakan kegiatan belajar mengajar secara cermat, jelas, tegas, sistematis, logis sesuai dengan tujuan instruksional khusus dan materi pelajaran yang akan disampaikan yang meliputi strategi atau metode dan pokok-pokok kegiatan siswa-guru.

³⁶ B Suryosubroto. *Proses Belajar Mengajar Disekolah*. (Jakarta : Rienaka Cipta, 1997) cet. I, hlm. 27

³⁷ Winarno dan R. Eko Djuniarto, *Perencanaan Pembelajaran*, (Jakarta : Direktorat Tenaga Kependidikan, 2003), hlm. 9.

Ketujuh, mempersiapkan dan melakukan variasi kegiatan sesuai dengan tuntutan interaksi belajar mengajar, motivasi dan kebutuhan siswa lainnya.

Kedelapan, memilih alat peraga, sumber bahan dari buku dan masyarakat yang di dasarkan kepada : (a) tujuan instruksional khusus yang hendak dicapai (b) bahan pengajaran yang akan disajikan (c) kegiatan belajar mengajar dan strategi instruksional yang dikembangkan, serta mengemukakan dan dengan jelas sumber dan alat tersebut, pengarang, nama buku, penerbit, tahun, dan lain-lain.

Kesembilan, merancang secara teliti prosedur penilaian atau evaluasi sesuai dengan tujuan instruksional yang hendak dicapai.

Kesepuluh, menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami dan ditulis, menurut ketentuan yang berlaku (EYD).

Kesebelas, menyusun satuan pelajaran (satpel) sesuai dengan bentuk yang dirancang prosedur pengembangan sistem instruksional (PPSI) sebagaimana tertera pada halaman lampiran.

Setelah rencana pengajaran atau satuan pelajaran siap disusun, langkah selanjutnya yang akan dikerjakan oleh guru yaitu melaksanakan proses belajar mengajar di kelas.³⁸

Perencanaan pembelajaran ini berperan sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efisien serta efektif. Dengan perencanaan yang matang diharapkan akan memperoleh pembelajaran maksimal.

Sebagaimana pendapat Muhammad Abdul Ahmad yang menyatakan bahwa:

أن يعد درسه فيحيد أداءه ليكون أقوى إيقاظاً لنشاط المعلمين،
وأبلغ أثراً في نفوسهم، وأدعى إلى حسن تقبلهم.³⁹

³⁸ H. Syafruddin Nurdin, dan M. Basyiruddin Usman . *Guru Profesional Dan Implementasi Kurikulum*. (Jakarta : Ciputat Pers 2002) Cet. I. Hlm 90-91

³⁹ Muhammad Abdul Qadir Ahmad, *Turuqu Ta'alimi at-Tarbiyah al-Islamiyah*, (Kairo : Maktabah al-Nahdoh al-Misriyah, 1980), hlm. 25.

“Untuk memperoleh penyajian pelajaran yang baik dan lebih merangsang aktivitas belajar peserta didik, hendaknya guru memiliki persiapan (perencanaan) pembelajaran yang baik-baik”

b. Pelaksanaan Interaksi Belajar Mengajar

Dalam pelaksanaan interaksi belajar mengajar meliputi membuka pelajaran, menyajikan materi, menggunakan metode / media, menggunakan alat peraga, menggunakan bahasan yang komunikatif, memotivasi siswa, mengorganisasi kegiatan, berinteraksi dengan siswa secara komunikatif, menyimpulkan pembelajaran, memberikan umpan balik, melaksanakan penilaian, menggunakan waktu.⁴⁰

Mengelola atau melaksanakan pembelajaran menuntut pula kemampuan dalam hal keaktifan menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam perencanaan. Pada tahap ini disamping pengetahuan teori tentang belajar mengajar, tentang peserta didik, diperlukan pula kemahiran dan ketrampilan teknik mengajar.⁴¹

c. Penilaian Prestasi Belajar Peserta Didik

Untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan pengajaran perlu dilakukan usaha dan tindakan atau kegiatan untuk menilai penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajari tujuan yang ditetapkan.⁴²

Menilai atau evaluasi merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data; berdasarkan data tersebut kemudian dicoba membuat suatu keputusan. Sudah barang

⁴⁰ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), cet.II, hlm. 7.

⁴¹ Nana Sudjana, *op.cit.*, hlm. 21.

⁴² B. Suryosubroto, *op.cit*, cet.I, hlm. 53.

tentu informasi atau data yang dikumpulkan itu haruslah data yang sesuai dan mendukung tujuan evaluasi yang direncanakan.⁴³

Kegiatan evaluasi ini telah dianjurkan oleh Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. (الحشر : 18)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hasyr : 18)⁴⁴

Kegiatan penilaian atau evaluasi mencakup penilaian terhadap kemajuan belajar peserta didik dalam aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesudah mengikuti proses pembelajaran.⁴⁵ Dengan melakukan evaluasi guru dapat mengetahui tingkat kemajuan belajar peserta didik, menempatkan peserta didik dalam situasi belajar mengajar yang tepat dan memperoleh umpan balik atau *feed back* dan KBM yang dilakukan.

Selain itu, penilaian juga merupakan *balance* antara rencana dan tujuan yang ingin dicapai. Tanpa penilaian maka akan sulit mengetahui apakah kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana dan tujuan dapat dicapai dengan baik, apa kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi dan sebagainya.⁴⁶

Oleh karena guru merupakan orang yang paling mengetahui proses dan hasil belajar peserta didik, maka penilaian merupakan

⁴³ Ngalm Purwanto, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), cet.XI, hlm. 3.

⁴⁴ Soenarjo, dkk, hlm. 549

⁴⁵ Zuhairini, dkk., *Metodologi Pendidikan Agama*, (Solo : Ramadhani, 1993), cet.III, hlm. 146.

⁴⁶ Abdul Hamid dan A. Kader Djaelani (eds), *Pengembangan Profesional dan Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2003), hlm. 46.

kegiatan yang mutlak harus dilakukan oleh setiap guru dalam proses pembelajaran.

Agar penilaian dapat berjalan dengan baik maka guru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memahami dengan jelas pengertian, tujuan dan fungsi penilaian
- 2) Memahami dengan jelas prinsip-prinsip penilaian
- 3) Menguasai dengan baik jenis, teknik dan cara penilaian
- 4) Menguasai dengan baik penilaian terhadap proses dan hasil belajar peserta didik
- 5) Memahami dengan jelas standar penilaian.⁴⁷

Untuk dapat melaksanakan tugas dan profesinya tersebut di atas maka seseorang guru harus mengetahui dan memperlajari ilmu pengetahuan keguruan.⁴⁸

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.

Setiap orang yang akan melaksanakan tugas sebagai guru maka harus mempunyai kepribadian yang baik. Dalam Islam sosok pribadi guru yang baik adalah sebagaimana yang dicontohkan Allah yaitu dalam surat al-Ahzab ayat 21 :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. (الاحزاب : 21)

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Zahzab : 21)⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 46.

⁴⁸ Team Didaktik Metodik Kurikulum IKIP Surabaya, *Pengantar Didaktik Metodik Kurikulum PBM*, (Jakarta : Rajawali , 1989), cet.IV, hlm. 13.

⁴⁹ Soenarjo, dkk, *op.cit.*, hlm. 421

Dalam proses belajar mengajar pribadi guru sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi siswa, karena sikap dan tindakan serta tingkah laku seorang guru akan menjadi contoh bagi setiap siswanya dalam berbagai aspek kehidupan, mak guru harus dapat memberikan hal-hal yang baik dan pantas ditiru. Hal ini karena guru memberikan ilmu.

Adapun kompetensi personal guru itu tertuang dalam hal fisik dan pribadinya.

a. Fisik

Seorang guru harus sehat jasmani, tidak cacat yang akan mengganggu menunaikan tugasnya dan tidak mempunyai penyakit yang menular. Dengan kondisi fisik yang prima seorang guru akan melakukan tugas sebagai pendidik dan pengajar.⁵⁰

b. Kepribadian

Guru diharapkan mempunyai sikap / kepribadian yang mantap dan memadai sehingga mampu mengelola PBM secara efektif. Guru dituntut untuk memiliki sikap yang positif terhadap profesinya sehingga akan menyikapi tugasnya dengan baik dan sikap yang baik terhadap peserta didik akan sangat mendukung keberhasilan tugas guru khususnya dalam mengelola proses pembelajaran. Sikap guru yang baik meliputi sikap terhadap diri, profesi dan teman sejawat serta sikap terhadap peserta didik.⁵¹

Menurut Zakiah Daradjat kepribadian yang sesungguhnya adalah abstrak (*ma'nawi*), sukar dilihat atau diketahui secara nyata, yang dapat diketahui adalah penampilan atau bekasnya dalam segala segi dan aspek kehidupan. Misalnya dalam tindakan, ucapan, caranya

⁵⁰ Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), cet.XV, hlm. 140-141.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), cet. II, hlm. 270.

bergaul, berpakaian dan dalam menghadapi setiap persoalan atau masalah, baik yang ringan maupun yang berat.⁵²

Kepribadian guru yang paling disukai oleh murid-murid adalah:

- 1) Suka membantu dalam pekerjaan sekolah, menerangkan pelajaran dan tugas dengan jelas serta mendalam dan menggunakan contoh-contoh sewaktu mengajar.
- 2) Riang, gembira, mempunyai perasaan humor dan suka menerima lelucon atas dirinya.
- 3) Bersikap akrab seperti sahabat, merasa seorang anggota dalam kelompok kelas.
- 4) Menunjukkan perhatian pada murid dan memahami mereka.
- 5) Berusaha agar pekerjaan sekolah menarik, membangkitkan keinginan belajar.
- 6) Tegak, sanggup menguasai kelas, membangkitkan rasa hormat pada murid.
- 7) Tak pilih kasih, tidak mempunyai anak kesayangan.
- 8) Tidak suka mengomel, mencela, mengejek, menyindir.
- 9) Betul-betul mengajarkan sesuatu kepada murid yang berharga bagi mereka.
- 10) Mempunyai pribadi yang menyenangkan.⁵³

Guru yang tidak disukai oleh murid-murid adalah:

- 1) Terlampau sering marah, tak pernah senyum, sering menyela, mengecam.
- 2) Tak suka membantu murid melakukan pekerjaan sekolah, tak jelas menerangkan pelajaran dan tugas, tidak membuat persiapan.
- 3) Pilih kasih, menekan murid-murid tertentu.
- 4) Tinggi hati, sombong, tak mengenal murid.

⁵² Zakiah Daradjat, *Kepribadian Guru*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1989), cet.II, hlm. 16.

⁵³ S. Nasution, *Didaktik Asas-asas Mengajar*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), cet.II, hlm.

- 5) Tak karuan, kerja, tak toleran, kasar, terlampau keras, menyuramkan kehidupan murid.
- 6) Tak adil memberi angka dalam ulangan dan ujian.
- 7) Tak menjaga perasaan anak, membentak-bentak murid dihadapan temannya sekelas; murid-murid takut merasa taka man.
- 8) Tidak menaruh perhatian kepada murid dan tidak memahami murid.
- 9) Memberi tugas dan pekerjaan rumah yang tak sepatasnya.
- 10) Tidak sanggup menjaga disiplin di dalam kelas, tidak dapat mengontrol kelas dan tidak menimbulkan rasa hormat untuk dirinya.⁵⁴

3. Kompetensi Profesional

Kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Kemampuan menguasai bahan pelajaran merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar, jangan dianggap pelengkap bagi profesi guru. Guru yang professional harus menguasai bahan yang akan di ajarkannya.⁵⁵ Guru hendaknya menguasai bahan ajar wajib (pokok), bahan ajar pengayaan dan bahan ajar penunjang dengan baik untuk keperluan pengajarannya. Guru hendaknya mampu menjabarkan serta mengorganisasi bahan ajar secara sistematis (berpola), relevan dengan tujuan (TIK), selaras dengan perkembangan mental siswa, selaras dengan tuntutan perkembangan ilmu serta teknologi dan dengan memperhatikan kondisi serta fasilitas yang ada di sekolah dan atau yang ada di lingkungan sekitar sekolah.⁵⁶

Tugas utama dari seorang guru di sekolah adalah mengajak yakni menyampaikan atau memberikan pelajaran kepada siswa-siswa. Seorang guru yang berprofesi sebagai pengajar tidak boleh lalai untuk belajar atau menambah wawasan / pengetahuan. Seorang guru yang berpengetahuan atau berwawasan luas dengan guru yang kurang memiliki wawasan, akan

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

⁵⁵ Nana Sudjana, *op.cit.*, hlm. 22.

⁵⁶ A. Samana, *Profesionalisme Keguruan*, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), cet.I, hlm. 61.

terlihat dalam proses belajar mengajar yaitu pada saat memberikan atau menyampaikan pelajaran. Guru yang berwawasan luas dalam penyampaian materi karena hanya satu materi yang disampaikan tanpa adanya dukungan dari materi / ilmu lain.

Penguasaan bahan atau materi oleh guru sangat penting artinya penguasaan bahan ini tidak terbatas pada materi pelajaran yang diajarkannya melainkan juga materi pelajaran yang lain sebagai pendukung. Menurut Sardiman A.M. yang dimaksud dengan modal penguasaan dua lingkup materi ini, yakni materi bidang studi dan bidang studi penunjang.⁵⁷ Seorang guru diharapkan dapat menyampaikan materi pelajaran dengan baik, sehingga tujuan yang akan dicapai dalam hal penyampaian materi pelajaran akan dapat tercapai secara maksimal.

4. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua / wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Hubungan antara guru dan murid-murid haruslah baik dan erat, yaitu seperti hubungan antara bapa dengan anak, guru harus memandang murid-muridnya seperti anak-anaknya. Ia korbakan segala sesuatu untuk kepentingan dan kebaikan murid-muridnya. Jangan sampai hubungan antara guru dan murid dengan pukulan, hukuman, kekerasan dan kemarahan, jangan memandang murid-murid dengan pandangan kehinaan dan mengasingkan diri dari mereka. Janganlah guru menyangka, bahwa bergaul dengan murid-murid itu mengurangi kekuasannya dan menghilangkan kehormatannya. Bahkan hal tersebut akan menambah kasih sayang mereka kepada gurunya. Jadi guru sebagai wakil dari ibu, bapak dalam mendidik dan mengajar haruslah ia bertindak seperti ibu bapak tentang keadilan, kesabaran, kesantunan dan kesayangan terhadap

⁵⁷ Sardiman A.M., *op.cit*, hlm. 162.

semua murid-muridnya. Apalagi kepada murid yang bodoh dan nakal, sehingga menjadi murid yang pandai dan baik.⁵⁸

Dalam kode etik guru ayat 7 disebutkan bahwa guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. Ini berarti bahwa: (1) Guru hendaknya senantiasa saling tukar informasi, pendapat saling menasehati dan Bantu membantu satu sama lain, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam penunaian tugas profesi, (2) Guru tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan nama baik rekan-rekan seprofesinya dan menjunjung martabat guru, baik secara pribadi maupun secara keseluruhan.⁵⁹

Seorang guru bukan hanya bertugas di sekolah saja, tetapi juga di rumah dan masyarakat. Di rumah guru sebagai orang tua (ayah, ibu) adalah pendidik putra-putrinya. Di masyarakat guru harus bias bergaul dengan mereka dengan cara saling membantu, tolong menolong, sehingga ia tidak dijauhi oleh masyarakat sekitar. Sebagaimana firman Allah :

.....تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (المائدة : 2)

“..... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)⁶⁰

Untuk itu pendidik harus mempunyai kemampuan, kecakapan serta ketrampilan dalam bidang kemasyarakatan. Selain itu guru harus mampu mendidik dan mengajar masyarakat agar menjadi warga negara yang baik yang bermoral.⁶¹

⁵⁸ Mahmud Yunus, *Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1978), cet.II, hlm. 63.

⁵⁹ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994), cet. I, hlm. 339.

⁶⁰ Soenarjo, *op.cit.*, hlm. 156.

⁶¹ Syaiful Bahri Djamarah, *op.cit.*, hlm. 37.

Oleh sebab itu seorang guru wajib memiliki sifat budi pekerti dan sikap sosial sebagai berikut:

- a. Cinta dan percaya pada masyarakat sekitarnya.
- b. Peka terhadap perubahan masyarakat dan lingkungan hidupnya.
- c. Mudah bergaul dan menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa kehilangan kepribadiannya.
- d. Senang dan mudah ikut bekerja untuk perbaikan sesama manusia, masyarakat dan sekolahnya.
- e. Senang, mudah dan aktif bekerja untuk kepentingan umum dalam berbagai tugas sosial.
- f. Tidak mempunyai rasa harga diri kurang, tetapi tidak juga dihindangi rasa harga diri superior maupun suka menonjolkan diri.
- g. Mampu dan sanggup memimpin dan dipimpin.
- h. Suka bekerja bergotong royong atas dasar kekeluargaan.
- i. Bebas dari suku-isme, daerahisme dan agama-isme.⁶²

Oleh karena itu, guru profesional tidak dapat melepaskan diri dari masyarakat karena hal ini masuk dalam profesionalisme guru dan disatu pihak guru adalah warga masyarakat dan dipihak lain dia juga dituntut bertanggung jawab serta memajukan kehidupan masyarakat.⁶³

Secara ringkas dari uraian di atas dapat disusun pengertian bahwa guru adalah manusia yang mengemban nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak, manusia yang menjadi teladan, manusia yang berilmu, sebagai petunjuk dan pengarah, pemberi bekal kehidupan bagi bangsa. Oleh karena itu kompetensi guru tidak dapat dipisah-pisahkan karena antara satu kompetensi dengan kompetensi yang lain saling melengkapi.

⁶² A.G. Soejono, *Pendahuluan Didaktik Metodik Umum*, (Bandung : Biro Karya, 1980), cet.II, hlm. 55.

⁶³ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Konsep dan States*, (Bandung : Mandar Maju, 1991), hlm. 45.

BAB III

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

A. Kebijakan Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia. Oleh karena itu Negara sebagai lembaga yang bertanggung jawab secara formal, berkewajiban menyejahterakan rakyatnya melalui pendidikan. Maka sudah selayaknya pendidikan dikembangkan secara sistematis dan terarah oleh para pengambil kebijakan yang berwenang di Republik ini. Pembaharuan demi pembaharuan selalu diupayakan agar pendidikan benar-benar dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana telah diamanatkan oleh pendiri Republik yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945.¹

Di dalam GBHN 1999-2004 juga telah dikemukakan mengenai Visi dan misi pembangunan nasional. Visi pembangunan ini sering disebut agenda reformasi. Sebagai agenda reformasi yang menentukan visi haluan negara, dapat diidentifikasi menjadi dua hal penting. *Pertama*, dalam bidang pendidikan dinyatakan bahwa pendidikan yang bermakna diperlukan bagi pengembangan pribadi dan watak bangsa, untuk kebersamaan dan toleransi, *Kedua*, diperlukan pembangunan masyarakat yang demokratis, damai, berkeadilan dan berdaya saing. Kedua visi tersebut mempunyai implikasi yang sangat jauh dalam membenahi pendidikan nasional.²

Sedangkan misi pendidikan nasional ialah menciptakan suatu sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu, dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.³ Pemerintah di pusat dan di daerah merupakan perwujudan masyarakat, bangsa dan negara yang mengemban kepercayaan masyarakat untuk mengelola keseluruhan segi

¹ Suyanto, Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi; Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenniums III*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), hlm. 17.

² H.A.R.Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hlm. 67.

³ *Ibid.*

kehidupan bangsa (antara lain dalam bidang pendidikan).⁴ Sehingga dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia membutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah.⁵

Kebijakan dianggap sebagai suatu posisi atau pendirian yang dikembangkan untuk menanggapi suatu masalah atau isu konflik Dalam rangka pencapaian tujuan tertentu, biasanya dibedakan dari konsep-konsep yang saling terkait.⁶

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (pemerintah, organisasi, dan lain-lain).⁷ Sedangkan kebijakan menurut Campbell, adalah batasan keputusan untuk memandu masa depan.⁸ Lain lagi menurut Rich, Ia mengemukakan bahwa kebijakan tidak hanya mengatur system operasi secara internal, tetapi juga menyajikan pengaturan yang berhubungan dengan fungsi secara definitive diantara system.⁹

Berlakunya Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Menuntut adanya perubahan pengelolaan dibidang pendidikan yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Sehingga memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengelola daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya, terutama dibidang pendidikan. Meskipun demikian pemerintah pusat juga masih memberikan kewenangan-kewenangan dalam dunia pendidikan. Hal ini terlihat jelas pada Peraturan Pemerintah RI No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan Provinsi, sebagai daerah otonomi, khususnya pasal 2 butir 11, bidang pendidikan tercantum 10 butir kewenangan yang masih dipegang oleh pemerintah pusat. Terdapat 7 (tujuh) hal yang penetapannya masih dibawah

⁴ Munawar Soleh, *Politik Pendidikan*, (Jakarta: IPE dan Grafindo Khasanah Ilmu, 2005), Cet. I, hlm. 32.

⁵ M. Noor Syam dkk, *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*, (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1981), hlm. 8.

⁶ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfa Beta, 2004), hlm. 94.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), edisi ke-III, hlm. 149.

⁸ Syaiful Sagala, *op. cit.* hlm. 97.

⁹ *Ibid*

kewenangan pusat, diantaranya; standar kompetensi siswa serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian secara nasional, Standar materi pelajaran pokok, gelar akademik, biaya penyelenggaraan, penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa/mahasiswa, benda cagar budaya, dan kalender akademik.¹⁰

Dengan demikian pemerintah pusat masih memegang kendali walaupun tidak secara langsung. Standar yang diberikan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk menyeragamkan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kegiatan atau penyelenggaraan pendidikan di daerah seluruh tanah air. Karena banyaknya wilayah maka terdapat keragaman, sehingga diperlukan adanya penyeragaman atau suatu standar. Demikian juga dalam sistem pendidikan di negara kita yang bersifat sentralistik, kita mengenal berbagai jenis standar untuk melaksanakan dan mengokohkan sistem yang sentralistik tersebut. Segala sesuatu ditentukan oleh kekuasaan negara, yang ditopang oleh birokrasi yang kaku, peraturan-peraturan yang terpusat atau dipegang oleh pemerintah pusat dan tidak memberikan kebebasan di daerah-daerah untuk melaksanakan peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah.

Sedang salah satu komponen yang sangat penting dan menentukan dalam proses peningkatan kecerdasan bangsa ialah guru/pendidik. Seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya, bahwa guru merupakan bagian yang terpenting dalam pendidikan dan sebuah profesi yang membutuhkan keahlian dan kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai guru untuk mencapai keberhasilannya. Seorang guru/pendidik merupakan tenaga professional, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang SISDIKNAS No.20 tahun 2003, pasal 39 ayat (3). Begitu pentingnya peranan dan profesi seorang guru dalam mewujudkan tujuan nasional, maka kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh pusat dan pemerintah mengenai pendidikan (khususnya keberadaan seorang guru/pendidik).

Selain kebijakan-kebijakan diatas, terdapat juga kebijakan yang sangat fenomenal. Kebijakan mengenai anggaran yang sempat menjadi tarik-ulur

¹⁰ Sam M. Chan, Tuti T. Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

dikalangan para petinggi negeri ini, dan kalangan praktisi pendidikan, menjadikan fenomena ini menjadi sangat luar biasa. Betapa tidak, anggaran yang selama ini, hanya berkutat 6% dianggap sebagai biang terpuruknya dunia pendidikan di Indonesia.

Kecilnya anggaran ini menjadikan profesi keguruan dan dunia pendidikan, menjadi sesuatu yang tidak menarik. Pendidik yang sebenarnya menjadi ujung tombak kemajuan bangsa, justru terlunta-lunta di sekolah tempat ia mengabdikan. Disebabkan karena ia tidak mampu mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya.

Oleh karena itu, bangsa ini tidak hanya bisa iri dengan kemajuan yang dialami oleh Malaysia, Jepang, Singapura, ataupun Thailand. Negara tersebut telah lama menetapkan bahwa anggaran untuk alokasi pendidikan, sudah lebih dari 25% dari seluruh anggaran belanja Negara. Sedangkan Indonesia baru menetapkan 20% dari APBN/APBD, yang dicantumkan dalam UU. No. 20 SISDIKNAS tahun 2003. tentu saja cukup sulit bagi bangsa ini untuk mengejar ketertinggalan nya dari Negara lain.

B. Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi: (1) pemersatu bangsa, (2) penyamaan kesempatan, dan (2) pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Sementara itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan informasi sistem pendidikan nasional. Undang-Undang tersebut memiliki visi, misi, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan

yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan nasional adalah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing ditingkat nasional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global, dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip ekonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan visi dan misi pendidikan nasional tersebut diatas, reformasi pendidikan meliputi hal-hal berikut:

Pertama; penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses Pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran yang lebih menitikberatkan peran pendidik dalam mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didiknya bergeser pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta

didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memiliki estetika, sehat jasmani dan rohani, serta ketrampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kedua; adanya perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumber daya pembangunan, menjadi paradigma manusia sebagai subyek pembangunan secara utuh. Pendidikan harus mampu membentuk manusia seutuhnya yang digambarkan sebagai manusia yang memiliki karakteristik personal yang memahami dinamika psikososial dan lingkungan kulturalnya. Proses pendidikan harus mencakup: (1) penumbuhan kembangan keimanan, ketaqwaan; (2) pengembangan wawasan kebangsaan, kenegaraan, demokrasi dan kepribadian; (3) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) pengembangan, penghayatan, apresiasi dan ekspresi seni; serta (5) pembentukan manusia yang sehat jasmani dan rohani. Proses pembentukan manusia diatas pada hakekatnya merupakan proses pembudayaan dan Pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Ketiga, adanya pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan sosial kulturalnya dan pada gilirannya akan menumbuhkan individu sebagai pribadi dan anggota masyarakat mandiri yang berbudaya. Hal ini sejalan dengan proses per tahapan aktualisasi intelektual, emosional dan spiritual peserta didik di dalam memahami sesuatu, mulai dari tahapan paling sederhana dan bersifat eksternal, sampai tahapan yang paling rumit dan bersifat internal, yang berkenaan dengan pemahaman dirinya dan lingkungan kulturalnya.

Keempat, dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, diperlukan suatu aturan dasar (*benchmark*) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini kriteria dan kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk mewujudkan: (1) pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik, (2) proses

pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis, (3) hasil pendidikan yang bermutu dan terukur; (4) berkembangnya profesionalisme pendidikan dan tenaga kependidikan; (5) tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal; (6) berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan (7) terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Salah satu tujuan pokok negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini artinya, sejak awal berdirinya negara, kebodohan dan tingkat ilmu pengetahuan masyarakat yang rendah merupakan persoalan riil yang perlu ditangani melalui sistem pendidikan nasional yang menyeluruh dan terpadu. Perlu pembenahan, pembaharuan, peningkatan dan intensifikasi yang terus-menerus agar tujuan pokok ini dapat tercapai.

Sebagai satu hak asasi manusia, pendidik harus diusahakan dan difasilitasi negara agar lembaga pendidikan tidak menjadi lahan bisnis yang berakibat biaya pendidikan mahal. Oleh karena itu, tugas pokok negara dalam kaitannya dengan ini meliputi:

1. Upaya memperluas dan pemeratakan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
2. Upaya meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan
3. Upaya memperbaharui sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, termasuk pembaharuan kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional

dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.

4. Upaya memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.
5. Upaya memperbaharui dan memantapkan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
6. Upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni.
7. Upaya mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.

Bagi guru dan dosen sendiri kini cukup berbesar hati karena pada 30 Desember 2005 kemarin pemerintah telah mensahkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Julukan yang melekat sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa” yang terkesan *gembel* dan *kere* kiranya dengan lahirnya undang-undang ini mengubah harkat, martabat, dan kesejahteraannya sebagai “pahlawan dengan tanda jasa”. Regulasi ini tidak dimaksudkan ada upaya komersialisasi lembaga pendidikan di balik peningkatan dan jaminan hak-hak normatif guru dan dosen. Justru, dengan undang-undang ini segala bentuk penyimpangan di luar standar yang ditetapkan undang-undang dapat dipidanakan.

Namun terlepas dari nilai positifnya, ada beberapa kekurangan yang muncul dalam undang-undang tersebut. Pertama, dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa, ‘Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.’ Pasal ini sama sekali

tidak mengungkit keberadaan guru dalam jenjang pendidikan non formal. Padahal, dalam UUD No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jelas pendidikan nonformal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem pendidikan nasional. Dengan demikian ada kotomi antara pendidikan formal dan nonformal. Kedua, sertifikasi Guru dan Dosen dalam rangka menjaga standar kompetensi dan kualitas. Isyarat perlunya sertifikasi ini kiranya tidak perlu berlaku surut karena dikalangan guru senior sendiri rata-rata lulusan berijazah SPG/SGO/SGA/KPG. Jika ketentuan ini diberlakukan kepada mereka jelas menimbulkan demo dimana-mana. Seyogyanya ketentuan ini berlaku untuk ke depan.¹¹

C. Bab IV dan V Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen tentang Kualifikasi, Kompsetensi, Sertifikasi Guru dan Dosen

1. Persyaratan guru dalam bab IV bagian pertama tentang Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi

a. Pasal 8

Guru wajib mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

b. Pasal 9

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

c. Pasal 10

(1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

¹¹ Tim Penyusun, *Undang-undang NO. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. v-viii

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

d. Pasal 11

- (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur Peraturan Pemerintah.

e. Pasal 12

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

f. Pasal 13

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

g. Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
 - (a) Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - (b) Mendapatkan promosi dan penghargaan dengan tugas dan prestasi kerja;

- (c) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- (d) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- (e) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- (f) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- (g) Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- (h) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- (i) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- (j) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- (k) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Persyaratan Dosen dalam bab V bagian pertama tentang Kualifikasi, Kompetensi dan Jabatan Akademik

a. Pasal 45

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

b. Pasal 46

- (1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:
 - (a) Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
 - (b) Lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
- (3) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luas biasa dapat diangkat menjadi dosen.
- (4) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan keahlian dengan prestasi luas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi.

c. Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - (a) Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - (b) Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - (c) Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

d. Pasal 50

- (1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen.
- (2) Setiap orang yang akan diangkat menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti proses seleksi.
- (3) Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki jenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
 - (a) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - (b) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - (c) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - (d) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - (e) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - (f) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
 - (g) Memiliki organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

f. Pasal 8

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.

g. Pasal 10 ayat (1)

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

BAB IV
ANALISIS
KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DAN RELEVANSINYA
TERHADAP KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

A. Analisis Pentingnya Kompetensi Bagi Pengembangan Profesionalitas Guru PAI

Pendidikan bagi sebuah bangsa merupakan sesuatu yang sangat *urgensi*. Karena, akan menjadikan bangsa itu terhormat diantara bangsa-bangsa di dunia. Tetap tegaknya sebuah bangsa, adalah karena bangsa itu beradab. Sehingga akan dapat mempertahankan dan melindungi kedaulatan negaranya. Termasuk bangsa Indonesia, bisa tetap berdaulat karena segenap rakyat Indonesia peduli akan pendidikan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UU. RI tahun 1945. Pendidikan juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga dapat mengolah sumber daya alam dengan baik.

Memasuki era-perdagangan bebas, pendidikan harus mampu mengembangkan sumber daya manusia yang dapat menunjang pembangunan Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Sumber daya manusia yang bermutu sedikitnya memiliki tiga komponen yaitu, *pertama*, kemampuan menguasai keahlian dan bidang ilmu teknologi. *Kedua*, kemampuan bekerja secara profesional. *Ketiga*, kemampuan menghasilkan karya yang bermutu. Ketiga, kompetensi ini mungkin dirasa berat bagi pendidikan Islam.¹

Secara nasional, pemerintah sebetulnya telah merencanakan bahwa fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan pendidikan sebagai kunci utamanya. Mesti terbilang sulit untuk menentukan karakteristik atau ukuran yang tepat dalam mengukur mutu

¹ Munawar Sholeh, *Politik Pendidikan*, (Jakarta: IPE, Grafindo Khasanah Ilmu, 2005) Cet. 1, hlm. 44-45.

pendidikan, tetapi ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukurnya, yaitu (1) kualitas guru dan (2) alat Bantu proses pendidikan.²

Sedang, upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia membutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah, ini berarti pemunculan kebijakan itu harus dilandaskan pada orientasi tujuan yang kuat.³ Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah RI dalam bidang pendidikan tidak hanya berbentuk Undang-undang saja. Undang-undang itu masih diiringi pula dengan peraturan pemerintah (PP) sebagai ketentuan hukum yang bersifat terkait dalam mewujudkan ketentuan hukum di dalam Undang-undang. Selain itu kebijakan juga dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Sistem Pendidikan Nasional adalah sebuah sistem yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.⁴ Dan pada tahun 1989 Bangsa Indonesia telah berhasil merumuskan tentang sistem pendidikan nasional ini yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, UU ini merupakan produk hukum, yang bermaksud mengatur aspek kehidupan yang disebut pendidikan dilingkungan masyarakat atau bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 27 Maret 1989.⁵ Kemudian seiring tuntutan pembaharuan pendidikan di Indonesia, kebijakan pendidikan telah mengalami beberapa kali perubahan, sehingga Undang-undang No. 2 Tahun 1989 sejak tahun 2003 telah diganti dengan Undang- undang No.20 Tahun 2003, yang disahkan pada tanggal 11 Juni 2003.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 ini merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi Sistem Pendidikan Nasional, memuat visi, misi, fungsi dan tujuan pendidikan Nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdaya saing dalam kehidupan global.

² *Ibid*, hlm. 91-92.

³ *Ibid*, hlm. 32.

⁴ Haidar Putra Daulay, *Op. Cit*, hlm. 10.

⁵ Hadari Nawawi, H. Mimi Martini, *Kebijakan Pendidikan Indonesia; Ditinjau dari Sudut Hukum*, (Yogyakarta: Gajah mada, Universiity Press), hlm. 1

Sehubungan dengan ini maka ditetapkan peraturan pemerintah (PP) No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.⁶ PP ini dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. PP ini memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya.⁷ Salah satunya memuat Standar pendidik dan tenaga kependidikan yang dijadikan sebagai acuan standar yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik dalam peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam lembaga pendidikan di Indonesia.

Dan pada bulan Desember 2005 pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-undang tentang Guru-Dosen dalam UU No.14 Tahun 2005. Undang-undang ini dikeluarkan untuk mengatur guru dan dosen pendidikan di Indonesia. Adapun latar belakang diterbitkannya UU ini, bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat.⁸

Dikeluarkannya Undang-undang karena secara profesional guru dan tenaga pendidikan di negara kita masih belum memenuhi harapan dan dari segi kuantitatif jumlah guru dan tenaga kependidikan masih belum memadai. Terutama guru agama. Sehingga diharapkan guru harus bersikap profesional dalam menjalankan tugas dalam proses belajar mengajar. Guru dalam arti profesional adalah setiap orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus (kompetensi) melakukan tugas di bidang keguruan untuk memberi ilmu pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan kepada terdidik yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek pribadinya.

⁶ Peraturan Pemerintah R.I. No. 19 Tahun 2005 *Tentang Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta: BP.Cipta Jaya, 2005), hlm. 53.

⁷ *Ibid*, hlm, 56.

⁸ Tim Penyusun, *Undang-undang NO. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 6.

Jadi untuk mencapai efisiensi dan efektifitas kerja, sangat dirasakan perlu adanya kompetensi yang harus dimiliki guru dalam rangka penciptaan profesionalitas seorang guru. Sebab kompetensi guru adalah faktor yang penting dalam proses belajar mengajar. Karena Pendidikan Islam merupakan upaya mendidik agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup) seseorang. Maka dalam Pendidikan Islam sangat dibutuhkan seorang guru agama yang benar-benar menguasai materi Agama Islam dan menyadari ciri-ciri Pendidikan Islam agar dapat menjalankan tugas mengajarnya secara profesional dan sesuai kompetensi yang dia miliki.

sebagaimana sabda Nabi SAW;

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا وُضِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. (رواه البخاري)⁹

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, telah bersabda Rasulullah saw, “ Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang tidak ahlinya maka tunggulah kehancurannya.” (H.R. Bukhari)

Guru merupakan tenaga pendidik khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Jelaslah guru adalah tenaga profesional dibidang pendidikan yang tugasnya mengajar. Oleh karena itu, guru dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi sebagai pengajar baik kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi dalam rangka menuju profesionalisme kerja.

Secara naluri, yang harus menjadi guru adalah orang tua, tapi keadaan telah berubah, dengan pesatnya ilmu pengetahuan yang semakin meroket. Begitu juga dengan teknologi. Oleh karena itu, tampaknya kedudukan orang tua dalam memberikan ilmu sangat terbatas sehingga sekolah dan gurupun harus mengambil alih peran orang tua. Sehingga peran perspektif orang tua

⁹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Lebanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), Juz. I, hlm.26.

sebagai gurupun lambat laun akan terisolir oleh kondisi yang muncul dari lingkungan sekolah.

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Menuntut adanya perubahan pengelolaan dibidang pendidikan yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Sehingga memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengelola daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya, terutama dibidang pendidikan. Meskipun demikian pemerintah pusat juga masih memberikan kewenangan-kewenangan dalam dunia pendidikan. Hal ini terlihat jelas pada Peraturan Pemerintah RI No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan Provinsi, sebagai daerah otonomi, khususnya pasal pasal 2 butir 11, bidang pendidikan tercantum 10 butir kewenangan yang masih dipegang oleh pemerintah pusat. Terdapat 7 (tujuh) hal yang penetapannya masih dibawah kewenangan pusat, diantaranya; standar kompetensi siswa serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian secara nasional, Standar materi pelajaran pokok, gelar akademik, biaya penyelenggaraan, penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa/mahasiswa, benda cagar budaya, dan kalender akademik.¹⁰

Dengan demikian pemerintah pusat masih memegang kendali walaupun tidak secara langsung. Standar yang diberikan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk menyeragamkan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kegiatan atau penyelenggaraan pendidikan di daerah seluruh tanah air. Karena banyaknya wilayah maka terdapat keragaman, sehingga diperlukan adanya penyeragaman atau suatu standar. Demikian juga dalam sistem pendidikan di negara kita yang bersifat sentralistik, kita mengenal berbagai jenis standar untuk melaksanakan dan mengokohkan sistem yang sentralistik tersebut. Segala sesuatu ditentukan oleh kekuasaan negara, yang ditopang oleh birokrasi yang kaku, peraturan-peraturan yang terpusat atau dipegang oleh

¹⁰ Sam M. Chan, Tuti T. Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

pemerintah pusat dan tidak memberikan kebebasan di daerah-daerah untuk melaksanakan peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah.

Sedang salah satu komponen yang sangat penting dan menentukan dalam proses peningkatan kecerdasan bangsa ialah guru/pendidik. Seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya, bahwa guru merupakan bagian yang terpenting dalam pendidikan dan sebuah profesi yang membutuhkan kompetensi (keahlian dan kemampuan) dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai guru untuk mencapai keberhasilannya.

Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat dilingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan.¹¹ Oleh karena itu seorang guru selain mempunyai kompetensi dalam proses belajar mengajar juga harus mempunyai kepribadian. Apalagi bagi guru Pendidikan Agama Islam, beban yang ditanggungnya tidaklah ringan karena disamping ia dituntut untuk memiliki kepribadian guru, ia juga harus mempunyai kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam.¹² Maksudnya selain tuntutan akan kepribadian yang terikat oleh kode etik keguruan sebagaimana umumnya, ia juga dituntut untuk memiliki kepribadian utama (kepribadian muslim dengan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari).

Selain kebijakan-kebijakan diatas, terdapat juga kebijakan yang sangat fenomenal. Kebijakan mengenai anggaran yang sempat menjadi tarik-ulur dikalangan para petinggi negeri ini, dan kalangan praktisi pendidikan, menjadikan fenomena ini menjadi sangat luar biasa. Betapa tidak, anggaran yang selama ini, hanya berkutat 6% dianggap sebagai biang terpuruknya dunia pendidikan di Indonesia.

Kecilnya anggaran ini menjadikan profesi keguruan dan dunia pendidikan, menjadi sesuatu yang tidak menarik. Pendidik yang sebenarnya menjadi ujung tombak kemajuan bangsa, justru terlunta-lunta di sekolah

¹¹ Moh Uzer Usman, *op.cit*, hlm. 7.

¹² Zakiyah Daradjat, dkk, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1996), hlm. 98.

tempat ia mengabdikan. Disebabkan karena ia tidak mampu mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya.

Oleh karena itu, bangsa ini tidak hanya bisa iri dengan kemajuan yang dialami oleh Malaysia, Jepang, Singapura, ataupun Thailand. Negara tersebut telah lama menetapkan bahwa anggaran untuk alokasi pendidikan, sudah lebih dari 25% dari seluruh anggaran belanja Negara. Sedangkan Indonesia baru menetapkan 20% dari APBN/APBD, yang dicantumkan dalam UU. No. 20 SISDIKNAS tahun 2003. tentu saja cukup sulit bagi bangsa ini untuk mengejar ketertinggalannya dari Negara lain.

Lebih lanjut Wardiman Djoyonegoro¹³ mengatakan bahwa pemerintah lebih memilih peningkatan bidang ekonomi dari pada membangun anak negeri. Kemudian ia menambahkan, anggaran itu ternyata hanya dijalankan 9,1% dari yang ditetapkan pemerintah, yakni 20%.¹⁴

Peningkatan kompetensi guru dalam rangka penciptaan profesionalisme guru di negeri ini merupakan ungkapan semu dan bahkan tidak dikenal dari segi praktis dunia pendidikan kita. Betapa tidak, profesi pendidik hanya menjadi sambilan dan menjadi alternatif terakhir setelah mendapatkan profesi yang lain, disamping itu kebijakan yang tidak memihak pada pendidik menyebabkan dunia pendidikan kita tetap berhenti ditempat. Ironis memang, dunia pendidikan yang notabene merupakan induk yang melahirkan SDM yang mengisi berbagai posisi profesi harus di pandang setengah hati.

B. Relevansi Kompetensi Guru PAI terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

Gerakan peningkatan mutu pendidikan nasional yang di canangkan Mendiknas pada 2 mei 2002 perlu di sambut oleh semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Upaya peningkatan kualitas pendidikan tersebut hendaknya diawali dari modal kompetensi yang kuat yang harus dimiliki oleh aktor pendidikan yaitu guru (pendidik).

¹³ Adalah mantan Menteri Pendidikan Nasional masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie.

¹⁴ Harian Pelita, *Pemerintah Lebih Memilih Ekonomi*, (Jakarta, Kamis 15 Juni 2006), hlm.

Tuntutan profesionalitas guru PAI, menghendaki adanya kematangan pribadi, yang siap melakukan interaksi,. Komunikasi, bimbingan dan penyuluhan, administrasi, penguasaan, penilaian atau evaluasi pendidikan dan sebagainya, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah siap. Kematangan dan kedewasaan sangat berpengaruh dalam prose pendewasaan anak didik sebagai tujuan utama pendidikan.

Tugas guru tidak sekedar mengajarkan bahan bidang studi keahliannya, tapi juga bertugas sebagai tenaga ahli kependidikan di bidang perencanaan dan pengembangan kurikulum. Dengan ketrampilannya menentukan jenis bidang studi itu, guru akan memperoleh kemampuan yang lebih mendalam tentang menyeleksi bahan bidang studi yang paling dibutuhkan oleh masyarakat

Kompetensi sebagai modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru sangat di butuhkan adalam melaksanakan proses belajar mengajar dan menciptakan pola pembelajaran yang berkualitas bagi hasil pendidikannya. Dalam kompetensi terkandung:

1. Pengetahuan (*Knowledge*); kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhan.
2. Pemahaman (*Understanding*); yaitu kedalaman kognitif, dan efektif yang dimiliki oleh individu, misalnya seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik, agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien.
3. Kemampuan (*Skill*); adalah sesuatu yang dimiliki individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya kemampuan guru dalam memiliki dan membuat alat peraga sederhana untuk memberi kemudahan belajar kepada peserta didik.

4. Nilai (*Value*); adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku guru dalam pembelajaran (kejujuran., keterbukaan, demokrasi dan lain-lain).
5. Sikap (*Attitude*); yaitu perasaan atau reaksi terhadap sesuatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah.
6. Minat (*Interest*); adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu

Pendidikan Islam adalah suatu usaha sadar yang diselenggarakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam untuk membimbing manusia agar menjadi muslim dan dapat meningkatkan, mengembangkan, menyalurkan serta memelihara segenap potensi jasmani, ruhani, akal dan hawa nafsunya, sehingga mampu hidup lebih baik dan produktif yang dapat memenuhi kebutuhan diri, keluarga dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pendidikan Islam menitikberatkan kepada aspek kepribadian, juga aspek jasmani dan ruhani.

Esensi dari potensi dinamis dalam setiap diri manusia itu terletak pada keimanan atau keyakinan, ilmu pengetahuan, akhlak (moralitas) dan pengalamannya. Dan keempat potensi esensial ini menjadi tujuan fungsional pendidikan Islam. Oleh karenanya, dalam strategi pendidikan Islam, keempat potensi dinamis yang esensial tersebut menjadi titik dari lingkaran proses pendidikan Islam sampai kepada tercapainya tujuan akhir pendidikan, yaitu manusia dewasa yang mukmin atau muslim, muhsin dan muhlisin muttakin.

Untuk meraih cita-cit diatas seorang guru perlu membekali dirinya dengan kemampuan atau kompetensi yang menunjang bagi dirinya dalam setiap pembelajarannya karena pada dasarnya Guru memiliki kemampuan pribadi, maksudnya guru diharapkan mempunyai pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan serta sikap yang lebih mantap atau, memadai sehingga mampu

mengelola PBM dengan baik. Selain itu guru harus menjadi innovator, yaitu tenaga kependidikan yang mampu komitmen terhadap upaya perubahan dan informasi ke arah yang lebih baik dan guru juga harus mampu menjadi developer, yaitu guru mempunyai visi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya.

Dalam Kebijakan Pemerintah Tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen dinyatakan Guru wajib mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, yang meliputi: penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan interaksi belajar mengajar, penilaian prestasi belajar peserta didik.

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.

Kompetensi professional merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua / wali peserta didik, dan masyarakat sekitar

Ruang lingkup Pendidikan Agama meliputi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya. Adapun ruang lingkup bahan pelajarannya meliputi : ibadah, akhlak, Al Qur'an, muamalah, syari'ah dan tarikh (sejarah Islam) menuntut kemampuan lebih dari seorang guru baik secara materi maupun pribadi dari seorang guru.

Diantara tugas Guru Pendidikan Islam terkait dengan pentingnya kompetensi itu adalah sebagai berikut:

- a. Guru Pendidikan Islam harus menetapkan dan merumuskan tujuan pendidikan dan target yang akan dicapai. Menentukan tujuan pendidikan harus dilakukan oleh seorang Guru Pendidikan Islam sesuai dengan program yang akan dilaksanakan.
- b. Guru Pendidikan Islam harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai berbagai metode mengajar dan dapat menggunakan metode sesuai dengan situasi belajar yang ada.
- c. Guru Pendidikan Islam harus dapat memilih bahan dan mempergunakan alat-alat bantu yang ada untuk menunjang efisiensi metode yang digunakan.
- d. Guru Pendidikan Islam dapat menetapkan cara-cara penilaian setiap hasil pekerjaan sesuai dengan target yang akan dicapai dan sesuai pula dengan situasi belajar yang ada.

Mengelola proses belajar mengajar merupakan suatu taraf melaksanakan perencanaan program belajar mengajar. Dalam melaksanakan atau mengelola proses belajar mengajar berkaitan dengan pengetahuan teori tentang belajar mengajar. Misalnya yang menyangkut prinsip-prinsip mengajar, menggunakan alat bantu pengajaran, menggunakan metode mengajar, mengevaluasi pembelajaran dan sebagainya. Dalam melaksanakan program belajar mengajar guru harus mampu menguasai teknik evaluasi guna mengukur sejauhmana proses yang direncanakan itu mampu diserap oleh siswa dalam arti keberhasilannya. Selain itu bermanfaat pula untuk mengetahui beberapa kemajuan atau justru kemunduran yang dicapai oleh siswa dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu kompetensi ini penting untuk dikuasai oleh guru profesional, tanpa itu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan atau siswa mengetahui dan memahami pelajaran yang ia sampaikan Islamkan. Dan yang lebih penting guru untuk menguasai teknik

evaluasi adalah untuk *feed back* atau umpan balik dari seluruh proses belajar mengajar yang disampaikan.

Keberhasilan pengajaran yang dilakukan oleh guru PAI tergantung pada penguasaan terhadap kompetensi- kompetensi tersebut. Jika guru dapat mengelola kelas dengan baik peserta didik akan belajar dengan baik, akhlak yang mulia, akan menambah motivasi belajar peserta didik. Dengan demikian seterusnya keberhasilan proses pengajaran PAI tergantung pada kemampuan penguasaan kompetensi guru PAI dan sebaliknya.

Dalam menjalankan kewenangan profesionalnya, guru dituntut memiliki keanekaragaman kecakapan (*competencies*) yang bersifat psikologis, selanjutnya untuk mempermudah kita terhadap kompetensi guru tersebut, berikut ini disajikan sebuah tabel menurut Muhibbin:¹⁵

Ragam Dan Elemen Kompetensi		
Kompetensi Kognitif	Kompetensi Afektif	Kompetensi Psikomotor
1. Pengetahun - Pengetahuan kependidikan - Pengetahuan bidang studi 2. Kemampuan mentransfer strategi kognitif	1. Konsep diri dan harga diri 2. Efikasi diri dan efikasi kontekstual 3. Sikap penerimaan terhadap diri sendiri dan orang lain	1. Kecakapan fisik umum 2. Kecakapan fisik khusus - Kecakapan ekspresi verbal - Kecakapan ekspresi non verbal

Menurut beberapa ulama bahwa ada beberapa kemampuan dan perilaku yang perlu dimiliki oleh guru yang sekaligus merupakan profil guru pendidikan agama Islam (GPAI) yang diharapkan agar dapat menjalankan tugas-tugas kependidikan dapat berhasil secara optimal. Profil tersebut pada

¹⁵ Muhibin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 236.

intinya terkait dengan aspek personal dan profesioanal dari guru. Aspek personal menyangkut pribadi guru itu sendiri, yang selalu ditempatkan pada sisi utama. Aspek personal ini diharapkan dapat memancar dalam dimensi sosialnya, dalam hubungan guru dengan peserta didiknya, teman sejawat dan lingkungan masyarakatnya karena tugas mengajar dan mendidik adalah tugas kemanusiaan. Dan aspek profesional menyangkut peran profesi dari guru, dalam arti ia memiliki kualifikasi profesional sebagai seorang GPAI.¹⁶

Beberapa pendapat para ulama tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru pendidikan agama Islam, yaitu:

1. Menurut Al Ghazali; mencakup a). Menyajikan pelajaran dengan taraf kemampuan peserta didik, b). Terhadap peserta didik yaang kurang mampu, sebaiknya diberi ilmu-ilmu yang global dan tidak detail.
2. Menurut Abdurrahman al-Nahlawy; meliputi a). Senantiasa membekali diri dengan ilmu dan mengkaji serta mengembangkannya, b). Mampu menggunakan variasi metode mengajar dengan baik, sesuai dengan karekteristik materi pelajaran dan situasi belajar mengajar, c). Mampu mengelola peserta didik dengan baik, d). Memahami kondisi psikis dari peserta didik, e). Peka dan tanggap terhadap kondisi dan perkembangan baru.
3. Menurut Muhammad Athiyah Al-Abrosyi; mencangkup, a). Pemahaman tabiat, minat, kebiasaan, perasan dan kemampuan peserta didik, b). Penguasaan bidang yang diajarkan dan bersedia mengembangkannya.
4. Menurut Ibnu Taimiyah; Mencakup a). Bekerja keras dalam menyebarkan ilmu, b). Berusaha mendalami dan mengembangkan ilmunya.
5. Menurut Brikan Barky Al Qurasyi; meliputi a). Penguasaan dan pendalaman atas bidang ilmunya, b). Mempunyai kemampuan mengajar, c). Pemahaman terhadap tabiat, kemampuan dan kesiapan peserta didik.¹⁷

¹⁶ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 97.

¹⁷ Muhaimin, *Ibid.*, hlm. 98

Beberapa keterangan diatas menunjukkan relevansi kompetensi guru PAI dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen bahwa guru PAI dalam wujud profesinalitasnya harus dapat mempunyai beberapa kemampuan dalam menunjang proses pembelajarannya, sehingga nantinya seorang guru dapat mendapatkan kewajibannya sebagai pendidik dengan fasilitas yang berhak di dapatkan guru. Kemampuan yang harus dimiliki guru sebagai tugas suci dalam amelanjutkan proses generasi Islam kearah tujuan pendidikan seabagai khalifah dan abdi Allah SWT juga merupakan tuntutan dalam ajaran islam yang menjujungg tinggi keahlian dan kemmpuan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya agar tidak keluar dari jalur.

Sedang pemerintah sebagai penyelenggara sistem pendidikan nasional mempunyai kewajiban meningkatkan mutu pendidikan salah satunya melalui peningkatan kompetensi pengajar. Oleh karena terjadi bentuk saling melengkapi antara profesionalisme guru di lihat dari kaca kompetensi yang harus dimiliki guru yang di atur pemerintah dengan tuntutan Pendidikan dalam sudut pandang Islam dalam menjunjung tinggai kompetensi guru sehingga tujuan dari pendidikan bisa terarah dengan baik, semua didapatkan apabila kita dibekali dengan kemampuan yang memadai sesuai dengan ukurannya. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan lulusan dari peserta didik yang handal. Karena pada dasarnya tidak ada di dunia ini menjadi baik tanpa adanya pengelolaan pembelajaran yang baik dari pengajar.

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

Pada dasarnya dalam proses pembelajaran guru merupakan salah satu faktor yang sangat urgen. Oleh karenanya guru sebagai orang dewasa yang membimbing muridnya memiliki peran yang cukup dominan dan membutuhkan peningkatan kompetensi dalam proses pembelajaran PAI. Dari beberapa keterangan di bab sebelumnya dapat peneliti ambil simpulan :

1. Point penting yang dapat diambil dari dalam Kebijakan Pemerintah tentang Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan adalah diperlukan sumber manusia guru yang handal yang mempunyai beberapa kompetensi diantaranya kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi, sehingga tercipta pendidikan yang arahnya menuju terciptanya tujuan pendidikan yang diharapkan
2. Relevansi kompetensi guru PAI dengan dalam Kebijakan Pemerintah tentang Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen bahwa guru PAI dalam wujud profesinalitasnya harus dapat mempunyai beberapa kemampuan dalam menunjang proses pembelajarannya, sehingga nantinya seorang guru dapat mendapatkan kewajibannya sebagai pendidik dengan fasilitas yang berhak di dapatkan guru. Kemampuan yang harus dimiliki guru sebagai tugas suci dalam amelanjutkan proses generasi Islam kearah tujuan pendidikan seabagai khalifah dan abdi Allah SWT juga merupakan tuntutan dalam ajaran islam yang menjunjung tinggi keahlian dan kemmpuan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya agar tidak keluar dari jalur, karena pada dasarnya tidak ada di dunia ini menjadi baik tanpa adanya pengelolaan pembelajaran yang baik dari pengajar.

B. SARAN-SARAN

profesionalisme adalah hal yang penting dalam dunia Pendidikan Islam. Untuk itu penulis ingin memberikan saran-saran untuk lebih meningkatkan kedudukan profesionalisme guru pada masa yang akan datang, sebagaimana berikut :

1. Guru merupakan sosok yang digugu dan ditiru, maka hendaknya selalu berusaha melakukan segala aktivitas dengan disiplin dan mematuhi segala tata tertib yang berlaku di sekolah sebagai contoh yang baik bagi anak didik.
2. Sebagai guru hendaknya tidak hanya memberikan materi pelajaran saja, tetapi juga berinisiatif untuk meningkatkan hasil pengajaran terhadap siswa, dengan cara memberikan dorongan-dorongan kepada peserta didik dari teoritis menjadi amalan-amalan yang praktis dan agamis.
3. Kontrol guru terhadap anak didik dalam hal penilaian atau evaluasi harus dipertajam, sehingga perkembangan siswa dalam berbagai aspek dapat dimonitor secara tidak langsung oleh guru yang bersangkutan.
4. Sebagai profesi keguruan, hendaknya selalu mengoreksi kekurangan dirinya, kemudian meningkatkan kualifikasi dan kompetensi profesional dengan belajar, berlatih dan melakukan penelitian serta tetap berpegang teguh pada kode etik guru.

C. PENUTUP

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur alhamdulillah kehadiran Illahi Rabbi yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, selanjutnya sholawat dan salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk ummatnya yang terpilih.

Sebagai penulis skripsi ini, saya menyadari dengan sepenuh hati, bahwa meskipun penulis sudah berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran, namun karena keterbatasan kemampuan intelektual penulis, maka dengan penuh kesadaran saya mengakui skripsi ini isinya jauh dan sempurna. Oleh karena itu

penulis membuka bagi input kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, meskipun skripsi ini teramat sederhana, namun penulis mengharapkan agar memiliki nilai manfaat bagi diri dan pada khalayak terutama para guru, *amien*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Rasyidin, dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan-Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005, Cet.II.
- AR, Abdurrahman, *Pendidikan di Alaf Baru*, Yogyakarta, Prisma Sophie: 2003
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, cet. II.
- Azra, Azyumardi, *Paradidma Baru Pendidikan Nasional; Rekontruksi dan Demokrasi*, Jakarta: Kompas, 2002, Cet.1.
- ☞Az-Zarnuji, *Ta'lim Muta'lim*, Semarang: Al-Alawiyah, t.th.
- Best, John W., Terj. Drs. Sanapiyah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Chan, Sam M., Tuti T. Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- _____, *Kepribadian Guru*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989, cet. II.
- _____, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1996.
- Djimandono, Sri E. Stiwuryani, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT. Graznido, 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Researt*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Hamalik, Oemar, *Pendidikan Guru Konsep dan States*, Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Hamid, Abdul dan A. Kader Djaelani eds, *Pengembangan Profesional dan Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2003.
- Langgulung, Hasan, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Alhusna, 1992.
- Majid, Abdul, *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006, cet. II.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000, Cet. II.

- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi I, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad Ali, *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996.
- Mulyasa, E., *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, tth.
- _____, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muslam, *Pengembangan Kurikulum PAI Teoritis dan Praktis*, Semarang: PKPI2, 2004.
- Nasution, S., *Didaktik Asas-asas Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, cet. II.
- Nata, Abudin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- _____, *Sejarah Pendidikan Islam pada Periode Klasik dan Pertengahan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Cet.1.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994, cet. I.
- Nurdin, H. Syafruddin, dan M. Basyiruddin Usman, *Guru Profesional Dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Pers 2002 Cet. I.
- Nurdin, Syafrudin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Peraturan Pemerintah R.I. No. 19 Tahun 2005 *Tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2005.
- Pullias, Earl V. and James D. Young, *Teacher is Many Things*, USA: Fawcett, 1968.
- Purwanto, Ngalm, *Ilmu Pendidikan teoritis dan Praktis*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995.
- _____, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, cet. XI.
- _____, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003, cet. XV.
- Qadir, Muhammad Abdul, *Turuqu Ta'alimi at-Tarbiyah al-Islamiyah*, Kairo: Maktabah al-Nahdoh al-Misriyah, 1980.
- Rosyadi, Khoiron, *Pendidikan Profetik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Sagala, Syaiful, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: Alfa Beta, 2004.
- Saleh, Abdurrahman, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Samana, A., *Profesionalisme Keguruan*, Yogyakarta: Kanisius, 1994, cet. I.
- Sanjaya, Wina, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, Cet. 2.
- Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, Cet IX.
- Sholeh, Munawar, *Politik Pendidikan*, Jakarta: IPE, Grafindo Khasanah Ilmu, 2005 Cet. 1.
- Soejono, A.G., *Pendahuluan Didaktik Metodik Umum*, Bandung: Biro Karya, 1980, cet. II.
- Soenarjo dkk, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Penerbit Toha Putra, 1998.
- Suandy, Edy, et all., *Membangun Profesionalisme Muhammadiyah*, Yogyakarta: UAD Press: 2003.
- Sudjana, Nana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995.
- Suparno, Paul, *Guru Demokrasi di Era Reformasi Pendidikan*, Jakarta: PT, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Suryosubroto, B., *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. Jakarta: Rinneka Cipta, 1997 cet. I.
- Suyanto, Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi; Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenniums III*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000.
- Syah, Muhibin, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Syam, M. Noor, dkk, *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*, Surabaya: Usaha Offset Printing, 1981.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1992, Cet.1.

Team Didaktik Metodik Kurikulum IKIP Surabaya, *Pengantar Didaktik Metodik Kurikulum PBM*, Jakarta: Rajawali, 1989, cet. IV.

Team Penyusun Departemen Agama RI, *Filsafat Pendidikan Islam*, tahun 1984.

Tilaar, H. A. R., *Manajemen Pendidikan Nasional*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

_____, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, edisi ke-III.

Tim Penyusun, Undang-undang NO. 14 Tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Uhbiyati, Nur, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 1995.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional PT. Kloang Klede Putra Timur, 2003.

Usman, Moh. Uzer, *Menjadi Guru Professional*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000, Cet.11.

Wijaya, Cece dan A. Tabrani Rusyan, *Kemampuan Dasar guru dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992.

Winarno dan R. Eko Djuniarto, *Perencanaan Pembelajaran*, Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, 2003.

Yunus, Mahmud, *Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1978, cet. II.

Zuhairini, dkk., *Metodologi Pendidikan Agama*, Solo: Ramadhani, 1993, cet. III.

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

Nama : MAFTUHIN
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 19 Mei 1983
Alamat : Desa Pandansari Kelurahan Bedono
Kec. Sayung Kab. Demak

Jenjang Pendidikan Formal :

- | | |
|--|------------------|
| 1. SDN Bedono I | Lulus Tahun 1995 |
| 2. MTS Nahdlatusy Syubban Sayung | Lulus Tahun 1998 |
| 3. MA Hidayatusy Syubban Sayung | Lulus Tahun 2003 |
| 4. Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang | Masuk Tahun 2003 |

Pendidikan Non Formal :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Pondok Pesantren
Nahdlatusy Syubban Sayung Demak | Lulus Tahun 1998 |
| 2. Pondok Pesantren Al-fadlu Kaliwungu Kendal | Lulus Tahun 2001 |
| 3. Pondok Pesantren Assolihyiyah Genuk Semarang | Lulus Tahun 2003 |

Demikian daftar riwayat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, Juni 2008

Penulis

MAFTUHIN
NIM. 3103233